

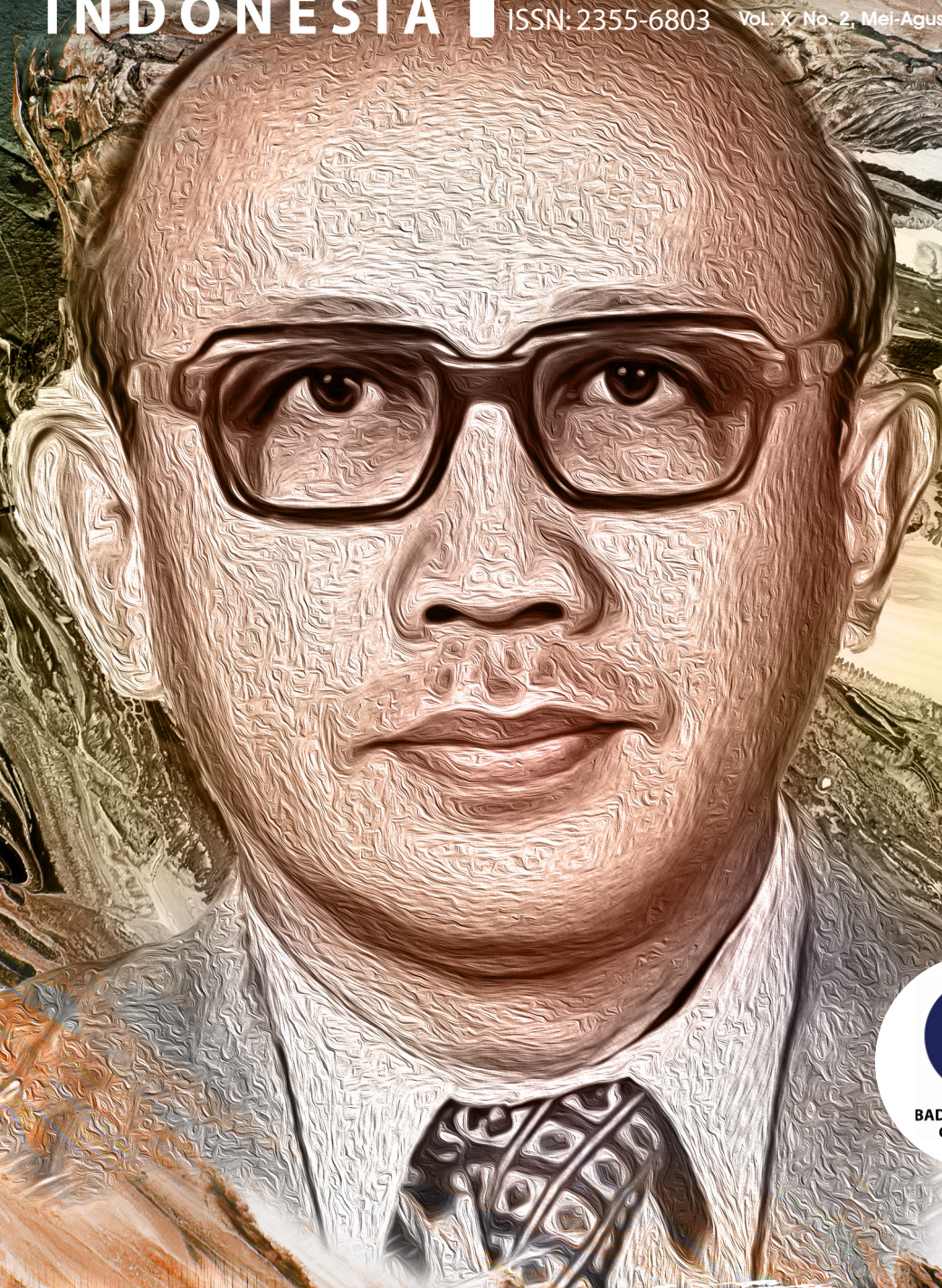
Satu Peta Menyatukan Negeri

Geospasial

INDONESIA

ISSN: 2355-6803

Vol. X No. 2, Mei-Agustus 2023



**PELETAK FONDASI PEMBANGUNAN
INFORMASI GEOSPASIAL INDONESIA**

106

Pilar Tanda Batas Negara

(Terpasang dan Terukur Sepanjang 2022)



40

Pilar Batas Negara
Republik Indonesia – Papua New Guinea
(Merauke)

36

Pilar Batas Negara
Republik Indonesia - Republik Demokratik Timor Leste
(Timur Tengah Utara)

10

Pilar *The Common Border Datum Reference Frame*
Republik Indonesia - Malaysia (Daoen/Aruk)

10

Pilar *Outstanding Boundary Problem* (OBP)
Republik Indonesia – Malaysia (Sinapad)

10

Titik Dasar Terverifikasi
(Gorontalo & Papua Barat)





Vol. X No. 2, Mei-Agustus 2023

PENGARAH:

MUH ARIS MARFAI
MUHTADI GANDA SUTRISNA
MOHAMAD ARIEF SYAFI
ANTONIUS B. WIJANARTO
IBNU SOFIAN

PENANGGUNG JAWAB:

SUPRAJAKA

PEMIMPIN REDAKSI:

MONE IYE CORNELIA MARSCIARELLI

EDITOR:

LUCIANA RETNO PRATIWI
KESTURI HARYUNANI PENDARI
INTAN PUJAWATI

FOTOGRAFER:

AGUNG TEGUH MANDIRA
MOHAMAD AFIF
HUSWANTORO ANGGIT

KONTRIBUTOR:

FARRAH L. PANGESTU, MARYANTO,
TOMMY NAUTICO, MAYA SCORYNA
ELLEN SURYANEGARA, BRAMANTO APRIANDI,
ABDI MAULANA RIZALI, LUTFIA RAHMAN,
HUSWANTORO ANGGIT, IVAN SETIAWAN,
MOHAMAD AFIF, HANIK NURDIANA SABITA

DISTRIBUTOR:

ARIK SUKARYANTI

DESAIN DAN LAYOUT:

MUCHLIS NCIS

ALAMAT REDAKSI:

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM. 46,
CIBINONG-BOGOR 16911, INDONESIA
TELP: (062-21) 8752062-63,
FAX (062-21) 8752064
WEBSITE: www.big.go.id
EMAIL: info@big.go.id
GEOPORTAL: tanahair.indonesia.go.id



@infogeospasial



infogeospasial



@infogeospasial



badaninformasigeospasial



www.big.go.id

Dari Redaksi

MENGENANG 100 TAHUN PRANOTO ASMORO

Majalah Geospasial Indonesia (MGI) edisi kedua tahun 2023 ini terbitan spesial. Redaksi memberi ruang khusus untuk membahas sosok Pranoto Asmoro, tokoh peletak fondasi pembangunan Informasi Geospasial (IG) di Indonesia.

Banyak keteladanan yang bisa dipetik pada sosok Pranoto Asmoro yang dikenal *humble* ini. Orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya menceritakan beragam kisah dengan begitu rinci. Semua terangkum dalam rubrik BIG ISSUE.

Salah satu kemajuan penyelenggaraan IG di Indonesia adalah pemanfaatan teknologi dalam survei dan pemetaan di wilayah laut dan lingkungan pantai. BIG telah menerapkannya saat survei batimetri di Perairan Karimun Jawa. Selain itu, juga survei menggunakan kapal tanpa awak atau *Unmanned Surface Vehicle* (USV) di perairan Sulawesi dan Nusa Tenggara. Pembaca dapat mencari tahu lebih jauh tentang survei tersebut pada rubrik BIG FOCUS dan BIG SCIENCE.

Pada edisi ini, redaksi menampilkan 'Peta Gunung Api di Bali dan Nusa Tenggara' untuk rubrik BIG MAP. Informasi ini memaparkan ratusan gunung api yang tersebar dari wilayah barat hingga ujung timur Indonesia. Khusus di wilayah Bali dan Nusa Tenggara saja, terdapat 21 gunung api tipe A.

Di rubrik BIG PROFILE, terdapat ulasan tentang Kepala Biro Umum dan Keuangan BIG Tito Setiawan. Kisahnya terbilang unik. Ia kembali menduduki jabatan yang sama dengan yang pernah diembannya sembilan tahun lalu.

Informasi baru tentang komunitas, hadir di Rubrik BIG COMMUNITY. Kami mengulas tentang Komunitas Lapak Kuliner BIG yang berjualan beragam kuliner via media sosial. Komunitas ini memudahkan warga BIG untuk mencari camilan atau makanan berat saat di kantor maupun di rumah.

Tak ketinggalan, artikel ringan tentang Batu Lemo Toraja tersaji di rubrik BIG UNIQUE. Artikel ini berkisah tentang destinasi wisata yang 'tak biasa' di Sulawesi Selatan dan telah terkenal hingga mancanegara.

Akhir kata, semoga bermanfaat.

Selamat membaca! (*MGI)

DAFTAR ISI

06

BIG ISSUE

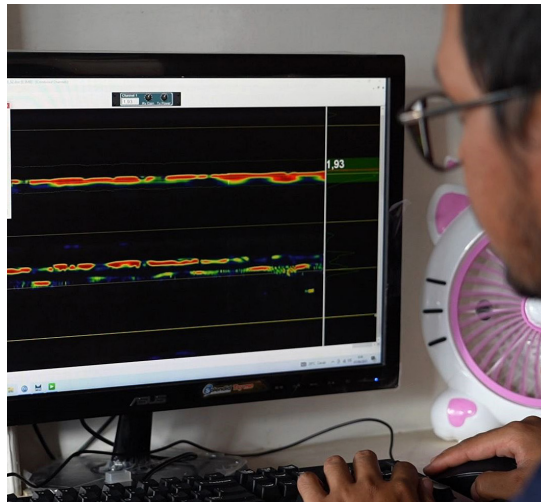
MENGENANG 100 TAHUN
PRANOTO ASMORO



12

BIG FOCUS

SURVEI BATIMETRI
KARIMUNJAWA



16

BIG SCIENCE

SURVEI USV UNTUK
PENGAMATAN GARIS PANTAI



24

BIG PROFILE

KERJA SAMA ITU PENTING!



20

BIG UPDATE

REFORMULASI SELEKSI PPPK

22

BIG MAP

GUNUNG API TIPE A
DI BALI DAN NUSA TENGGARA

28

BIG INFO

BIG DUKUNG PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR KABUPATEN
PEGUNUNGAN BINTANG

30

BIG INFO

PELATIHAN PRESENTASI DAN VIDEOGRAFI

37

BIG COMMUNITY

LAPAK KULINER BIG



Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai memberikan sambutan dalam acara pembukaan orientasi PPPK di Balai Diklat Geospasial pada 4 Juli 2023.

SELAMAT BERGABUNG PROFESIONAL MUDA!

Indonesia sedang diburu waktu. Banyak pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan.

Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi salah satu lembaga yang harus bergerak cepat untuk menuntaskan target survei dan pemetaan demi mendukung pembangunan. Namun, tugas ini perlu ditopang dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM).

Maka, tahun ini BIG menerima pegawai baru melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK merupakan SDM profesional yang sudah berpengalaman di bidangnya.

Kehadiran PPPK diharapkan dapat memperkuat 'pasukan tempur' BIG dalam menuntaskan tugas. Mereka pun dituntut cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru.

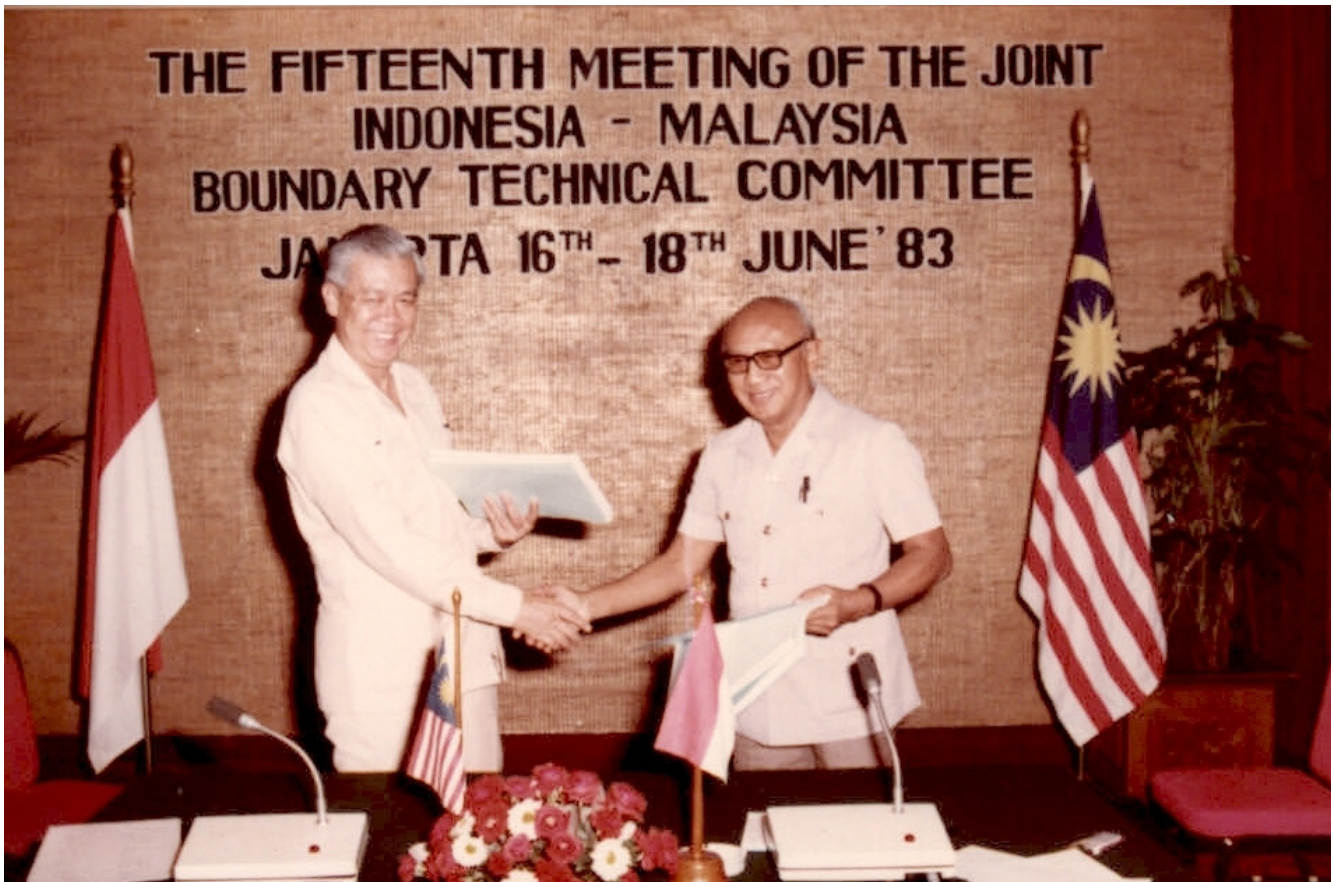
Tetapi, perlu diingat bahwa keberhasilan menyelesaikan tugas yang diembankan kepada unit kerja bukan terletak pada kepiawaian satu atau dua orang. Kerja sama tim tetap menjadi yang utama.

Kepala BIG Muh Aris Marfai berharap, para profesional muda PPPK dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan para senior dan rekan di unit kerja masing-masing. Ia juga mengingatkan agar para PPPK diberi 'ruang' untuk mengaktualisasikan kemampuan demi kepentingan bersama.

"Saya ucapkan selamat bergabung menjadi Keluarga Besar BIG," kata Aris dalam sambutannya di acara pembukaan orientasi PPPK pada 7 Juli 2023.

Pada hakikatnya, keluarga besar BIG dituntut menjalankan *core value* yang ditanamkan pada setiap ASN, yakni akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. *Core value* yang biasa disingkat BerAKHLAK tersebut tak hanya berlaku dalam melakukan pekerjaan, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan BerAKHLAK, mari satukan langkah. Bersama-sama kita tunaikan amanah penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) dengan sebaik-baiknya, demi kemajuan dan kejayaan Indonesia! (*MGI)



Dok: Arsip BIG

MENGENANG 100 TAHUN PRANOTO ASMORO

Peletak Fondasi Pembangunan Informasi Geospasial di Indonesia

“Gagasannya melahirkan semangat untuk mewujudkan Informasi Geospasial yang mandiri dan berdaulat, guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.”

Tahun 2023 menjadi istimewa karena bertepatan dengan peringatan 100 tahun kelahiran Pranoto Asmoro. Tidak berlebihan rasanya Badan Informasi Geospasial (BIG) turut merayakan kelahiran Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) yang pertama tersebut.

Pranoto, begitu ia biasa disapa, membuat banyak langkah fundamental dan strategis untuk membangun fondasi Informasi Geospasial (IG) di Indonesia. Perannya yang paling diingat adalah ketika berhasil meyakinkan Departemen Pertahanan dan Keamanan serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bahwa pemetaan topografi adalah tanggung jawab nasional.

Putra Jawa Barat kelahiran Purwakarta, 11 Juni 1923 ini, merupakan jenderal dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal TNI. Keterlibatannya di bidang survei dan pemetaan tak lain karena keahlian dan profesionalisme yang dimilikinya.

Pranoto muda bergabung dengan kemiliteran pada 1945. Awalnya ia ditugaskan sebagai ajudan tentara di Bandung, kemudian ditunjuk memimpin sekretariat Divisi Siliwangi.

Sempat juga Pranoto menjadi ajudan Abdul Haris Nasution yang kala itu menjabat sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Pernah pula ia dipercaya sebagai Kepala Staf Brigade di Jawa Barat.

Di penghujung 1950, Pranoto mendapat beasiswa pendidikan 'Pelajar Angkatan Perang' untuk kuliah di Jurusan Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB). Dulu, jurusan ini bernaung di bawah Universitas Indonesia (UI) dengan nama *Afdeling Geodesie, Universiteit van Indonesia, Faculteit der Technische Wetenschappen* (Jurusan Geodesi, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu-Ilmu Pengetahuan Teknik).

Pranoto lulus 1958 dengan gelar insinyur. Pada 1961, ia dikirim ke Amerika Serikat untuk mengikuti

kursus militer lanjutan dan topografi di Fort Belvoir, Virginia.

Kepakaran di bidang geodesi dan topografi membuatnya dipercaya menjabat sebagai Direktur Akademi Militer Jurusan Teknik pada Januari 1962. Tiga tahun berselang, pada 1965 Pranoto dilantik menjadi pejabat sementara Direktur Topografi Angkatan Darat untuk menggantikan Brigjen Soerjosoemarno yang pensiun. Dua tahun kemudian, ia menjadi pejabat definitif pada posisi yang sama.

Peristiwa penting yang menjadi fondasi kebangkitan IG Indonesia terjadi pada 1969, ketika Presiden Soeharto membentuk Bakosurtanal. Presiden mengangkat Pranoto Asmoro sebagai Kepala Bakosurtanal, dibantu oleh Jacob Rais dan Kardono Darmoyuwono.

Seusai pengangkatan, Pranoto meletakkan jabatannya sebagai Direktur Topografi Angkatan Darat. Sebagai gantinya, di tahun yang sama ia diangkat menjadi Kepala Pusat Survei dan Pemetaan (Kapusurta) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Jabatan rangkap sebagai Kapusurta ABRI dan Kepala Bakosurtanal dilakoninya selama empat tahun. Pranoto mengakhiri tugasnya sebagai Kapusurta ABRI pada 1974 untuk fokus sebagai pimpinan di Bakosurtanal. Ia menjabat sebagai Kepala Bakosurtanal hingga 1984.

NEGOSIATOR ULUNG

Di tangan Pranoto, eksistensi Bakosurtanal terangkat. Kepala Bakosurtanal Jacob Rais periode 1984-1994—dalam buku *Konsep Pemetaan, Penginderaan Jauh untuk Sumber Daya Alam dan Lingkungan*; Buku Kenangan Pengabdian Mayor Jenderal TNI (Purn) Ir. H. Pranoto Asmoro—menceritakan jika pada 1969 sudah ada proyek pemetaan bantuan Australia kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) yang dinamakan 'Defence Cooperation' (Defco).

Proyek tersebut menggunakan sandi Operasi Mandau (1969/1970) untuk pemetaan topografi di Kalimantan Barat, dan Operasi Gading (1970/1971) untuk pemetaan topografi Sumatra yang dimulai dari Lampung. Pelaksana proyek adalah Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittop AD), menggunakan anggaran pendamping untuk *grant* Australia oleh Dephankam.

Rupanya, Dephankam tidak bisa menyediakan anggaran pendamping lagi untuk tahun berikutnya karena memiliki prioritas lain. Pranoto sebagai Kappusurta ABRI sekaligus Kepala Bakosurtanal segera mengambil inisiatif meyakinkan petinggi ABRI dan Bappenas, bahwa pemetaan topografi merupakan tanggung jawab nasional. Ia juga menjelaskan bahwa konsepsi keterpaduan survei sumber daya alam dan pemetaan topografi sangat penting bagi pembangunan nasional.

Berbuah manis, Bappenas pun menggelontorkan anggaran pada Bakosurtanal. Pada tahun anggaran 1970/1972, untuk pertama kalinya Bakosurtanal memiliki proyek Pemetaan Dasar Nasional Matra Darat. Jacob Rais sebagai pemimpin proyek (pimpro), menggunakan anggaran tersebut untuk melakukan pemetaan dasar di Kalimantan Barat, Sumatra, Papua (dulu Irian Jaya), dan Maluku.

Keberhasilan Pranoto meyakinkan Bappenas menunjukkan kepiawaiannya sebagai negosiator ulung. Dalam berbagai kesempatan, Pranoto berhasil melakukan negosiasi dengan pihak dalam maupun luar negeri untuk mendukung kegiatan Bakosurtanal.

TEHERAN CONNECTION

Di awal berdirinya, Bakosurtanal langsung *action* mengikuti forum internasional. Pranoto menugaskan Jacob Rais sebagai delegasi Indonesia untuk menghadiri *UN Regional Cartographic Conference (UNRCC) for Asia and the Pacific* ke-6 di Teheran, Iran. Forum ini melahirkan *Teheran Connection*, semacam pertemuan informal antara Ketua Delegasi



Dok: Arsip BIG

Indonesia Jacob Rais dengan Ketua delegasi negara Belanda J. Visser dan Ketua Delegasi Kanada Bing Thompson. Utusan Belanda dan Kanada menyatakan siap membantu pengembangan pemetaan dan topografi di Indonesia.

Pada 1973, datang utusan Belanda ke Indonesia untuk menindaklanjuti pembahasan *Teheran Connection*. Pertemuan antara Pranoto dengan delegasi Belanda melahirkan tiga proyek bagi Bakosurtanal.

Pertama, pendirian Pusat Pendidikan Fotogrametri dan Kartografi (PPFK) di ITB. Masa pengerjaan proyek berlangsung pada 1975-1980. PPFK ditujukan pendidikan operator dan teknisi kartografi. Ini bukan hanya digunakan oleh Bakosurtanal, tapi juga instansi pemetaan lain.

Setelah proyek selesai pada 1980, gedung dan seluruh aset diserahkan kepada ITB sebagai cikal bakal pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang teknologi pemetaan dan kartografi di Indonesia.

Pranoto juga turut mendirikan Pusat Pendidikan Interpretasi Citra dan Survei Terpadu (PUSPICS) di Yogyakarta, bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Proyek pengembangan ini sesuai dengan pemikiran Pranoto sebagai visioner.

Ia menetapkan bahwa kebijakan pembangunan survei dan pemetaan Indonesia difokuskan pada SDM melalui peningkatan *knowledge* dan *skill* pegawai agar dapat melakukan *transfer of technology*. Guna meningkatkan kualitas SDM, Pranoto mengirim staf Bakosurtanal belajar ke PPFK dan juga mendorong mereka melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

Proyek kedua, berupa pendirian Pusat Pemetaan Departemen Pekerjaan Umum. Gagasan proyek ini berasal dari Pranoto yang melihat saat itu tidak ada koordinasi pemetaan antara direktorat jenderal di Departemen Pekerjaan Umum. Menurut Pranoto, koordinasi di tataran nasional tidak akan berhasil bila koordinasi dalam internal departemen/lembaga tidak berjalan.

Proyek ketiga adalah pengadaan bantuan alat fotogrametri dan kartografi di Badan Pertanahan Nasional.

Teheran Connection juga melahirkan bantuan dari *Canadian International Development Agency* (CIDA) yang dikenal dengan *Resource Evaluation*

Aerial Photography (REAP) Project. Proyek ini terlaksana pada 1978. Saat itu, Bakosurtanal memperoleh dua pesawat pemotretan udara Taurus King Air Type A-90 dengan kamera ganda RC-10 dan 10 alat penentu posisi dengan teknik Doppler.

Pranoto tidak tinggal diam menunggu datangnya proyek. Berulang kali ia menulis bermacam gagasan dalam bentuk laporan atau makalah ke berbagai pihak, termasuk Bappenas. Tindakannya tersebut dimaksudkan agar Bakosurtanal memperoleh anggaran memadai untuk mengembangkan pemetaan dasar di Indonesia.

Pada 1972, datang Mr. Drewes dari Bank Dunia ke ruang Pranoto. Tamu tersebut memperlihatkan makalah yang ditulis Pranoto tentang *Integrated Survey and Mapping System* dan mengatakan pihaknya tertarik dengan gagasan yang tertulis di makalah tersebut.

Singkat cerita, Bank Dunia memberi bantuan teknis untuk membangun infrastruktur Bakosurtanal di Cibinong, Jawa Barat. Pembangunan dimulai 1978, dengan mendirikan tiga gedung berupa gedung utama dan dua *wing*.

Pembangunan gedung diteruskan hingga didapatkan 11 gedung bertingkat dua. Bantuan Bank Dunia ini membuka mata para pembuat keputusan di dalam negeri bahwa pemetaan nasional itu memerlukan anggaran yang memadai.

KEBANGKITAN IG

Pranoto adalah orang yang kaya dengan ide visioner. Bahkan, beberapa gagasannya terus 'hidup' dan berkembang sampai sekarang.

Salah satu yang fundamental dan strategis adalah gagasan tentang konsepsi akselerasi pemetaan dasar dan inventarisasi sumber kekayaan alam darat nasional yang diutarakan pada 1973. Dalam pandangan Pranoto, tidak mungkin melakukan pembangunan tanpa memiliki

kekayaan alam. Guna mengetahui seberapa banyak dan di mana saja letak kekayaan alam itu, perlu adanya peta.

Pranoto terus menyempurnakan konsepsi akselerasi pemetaan dasar dan inventarisasi sumber kekayaan alam. Hingga pada 1976 Pranoto memaparkan makalah berjudul 'Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya dalam Rangka Program Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Daya Alam Nasional' yang menjelaskan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mendukung pembangunan nasional.

Sesungguhnya, gagasan Pranoto tersebut saat ini dikenal dengan nama Kebijakan Satu Peta (KSP). Program ini menjadi prioritas nasional untuk segera dituntaskan pada 2024,

karena sangat membantu pemerintah membuat perencanaan pembangunan di semua lini dan sektor.

Kepala BIG Muh Aris Marfai berharap, momen Mengenang 100 Tahun Pranoto Asmoro dapat menjadi penanda kebangkitan IG di Indonesia sebagai dasar perencanaan pembangunan yang maju, bermartabat, dan berkelanjutan.

"Semoga kiprah dan jerih payah Pranoto Asmoro dalam meletakkan dasar Informasi Geospasial bagi negeri ini dapat terus dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Jangan pernah lelah untuk Informasi Geospasial yang lebih baik di Indonesia," ucap Aris dalam BIG Talk dengan tema 'Mengenang 1 Abad Pranoto Asmoro – Tauladan dan Inspirasinya'. (*MGI)

Biodata Pranoto Asmoro

Lahir : Purwakarta, 11 Juni 1923

Meninggal : Jakarta, 29 April 2001 (usia 77 tahun)

Pendidikan:

- S1, Jurusan Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB), lulus tahun 1958
- Kursus Topografi di Fort Belvoir, Virginia, Amerika Serikat, lulus tahun 1961
- Sekolah Staf dan Komando Angkatan darat (SESKOAD), lulus tahun 1964

Pekerjaan:

- Direktur Akademi Militer Jurusan Teknik, tahun 1962-1964
- Direktur Topografi Angkatan Darat, tahun 1965-1970
- Kepala Survei dan Pemetaan ABRI, tahun 1970-1974
- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, tahun 1969-1984
- Pangkat Terakhir: Mayor Jenderal TNI (Purn)

Lain-lain:

- Inisiator dan *implementer* perubahan persepsi tentang peta topografi yang sifatnya rahasia menjadi peta rupabumi sebagai peta pembangunan yang sifatnya terbuka untuk publik.
- Orang non-Australia pertama yang mendapatkan penghargaan berupa pengangkatan sebagai *Honorary Fellow dari Institution of Surveyors Australia*.
- Ketua Ikatan Surveyor Indonesia (1980).
- Sejak 1972, mengaktualkan peran Bakosurtanal sebagai *national mapping agency* dalam penegasan batas negara, dengan menindaklanjuti hasil perjanjian batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia.

KETELADANAN SANG PEMIMPIN

Sosok Pranoto Asmoro lekat dengan keteladanan. Ia menjadi *role model* bagi banyak orang dalam bekerja dan mengarungi kehidupan. Berikut kesaksian dan ungkapan dari sejumlah orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Pranoto Asmoro.



SUKENDRA MARTHA

Sekretaris Utama Bakosurtanal (2004-2010)
(Editor Buku Kenangan Pengabdian Mayor Jenderal TNI (Purn) Ir. H. Pranoto Asmoro)

Pranoto Asmoro adalah seorang jenderal yang tidak mengutamakan *hard power*, tapi lebih menggunakan *soft power*. Beliau mampu memberikan motivasi luar biasa pada anak-anak muda, termasuk saya kala itu.

Saya pernah dilibatkan dalam tim untuk riset dan teknologi sumber daya alam (SDA). Tim beranggotakan para pakar di bidang SDA, tokoh-tokoh yang luar biasa. Saya yang saat itu masih muda, ikut dibawa serta. Saya benar-benar berterima kasih sekali. Di mata saya, beliau *figure* yang *humble*. Bukan melakukan *top down*, tetapi bekerja dari bawah.

Saat menjadi Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Pranoto Asmoro berhasil merukunkan bidang geodesi dan geografi melalui *topographic mapping* dan *thematic mapping*. Kegiatan ini menggunakan kamera hitam putih untuk topografi dan *infra red* untuk tematik.

Gebrakan lainnya, beliau merekrut pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menjadi deputi. Ini menjadi salah satu langkah strategis yang diambilnya.



ROCHMANDJADJA

Inspektur Bakosurtanal (2006-2011)

Saya mengenal Pranoto Asmoro sejak masih kuliah. Beliau seorang tentara tulen yang disiplin dan senantiasa bekerja keras. Tugas yang diberikan padanya selalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Banyak sisi personal beliau yang tidak diketahui orang lain. Salah satunya adalah kedekatannya dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Bahkan, beliau sebenarnya lebih bijak dari yang dikira kebanyakan orang.

Pak Harto ketika menjadi Presiden Indonesia pernah meminta untuk dilakukan pembangunan. Namun, Pranoto Asmoro memiliki pandangan sendiri.

"Bagaimana melakukan pembangunan, kekayaan kita mana? Kita akan dapat mengakui kekayaan kita kalau bisa memetakannya," ucap Pranoto kala itu. Dari sinilah akhirnya disadari pentingnya pemetaan dan didapatkannya dukungan dari Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) kala itu.



BAMBANG SAPTO PRATOMOSUNU

Inspektur Bakosurtanal (2003-2005)

Sebelum menjadi Kepala Bakosurtanal, Pranoto Asmoro menjabat di Direktorat Topografi Angkatan Darat. Jadi, beliau sangat menguasai manfaat peta topografi.

Dengan kemampuan yang dimilikinya, Pranoto Asmoro memiliki visi untuk mewujudkan peta sebagai dasar pembangunan. Inilah titik balik penggunaan peta topografi yang semula hanya untuk militer, mulai dikembangkan untuk kepentingan pembangunan nasional.

Tidak hanya itu, beliau juga menyarankan agar peta dapat diakses untuk kepentingan publik. Maka, lahirlah peta dasar atau peta rupabumi.

Sebagai pemimpin, Pranoto Asmoro selalu datang paling pagi dan meninggalkan kantor ketika seluruh pegawai sudah pulang. Ia pun selalu menjaga hubungan vertikal dengan bawahan, sehingga dapat menumbuhkan semangat dan menginspirasi.

Pranoto Asmoro dikenal senantiasa memberikan kepercayaan kepada bawahan agar dapat tumbuh. Tidak lupa, ia melakukan kaderisasi untuk memunculkan pemimpin baru di lingkungan Bakosurtanal.

**HENNY LILYWATI**

Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial
Bakosurtanal (2005-2009)

Pranoto Asmoro memiliki integritas yang tinggi dengan kepribadian jujur dan kuat. Saya melihat beliau berhasil membawa Bakosurtanal hingga besar dan memiliki `tempat` tersendiri. Ia juga visioner yang mengikuti perkembangan, kuat, dan belajar mengimplementasikan visi di dalam diri.

**ETTY KARIM**

Sekretaris Pranoto Asmoro

Pranoto Asmoro orang yang sangat baik, ramah, dan terbuka. Ia tidak pernah membangun `batasan` dengan karyawannya.

Beliau berjuang agar Bakosurtanal bisa mandiri dan keluar dari Jawatan Topografi (Jantop) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perjuangan akhirnya membuahkan hasil. Bakosurtanal yang awalnya menumpang pada Survei dan Pemetaan (Surta) ABRI, kemudian bisa memiliki gedung sendiri.

**HARDI KOESALAMWARDI**

Ketua Jurusan Geodesi ITB (1962-1963,
1972-1973) dan Direktur PPFK 1975-1976)

Saya bertemu Pranoto Asmoro saat masuk Jurusan Geodesi ITB. Beliau adalah Ketua Ikatan Mahasiswa Geodesi. Waktu itu, kita betul-betul *digembleng* Pranoto Asmoro dengan motivasi yang luar biasa. Beliau memberikan gambaran tentang geodesi.

Saya sempat mengusulkan agar Bakosurtanal tidak jauh-jauh dari UGM dan ITB, agar ada kerja sama yang berkesinambungan.

**PRODJO DANOEDORO**

Ketua Puspics (2008-2017)

Pranoto Asmoro adalah seorang yang visioner. Ia mampu mendorong perguruan tinggi agar lebih berkembang dengan mendirikan program pascasarjana. Ketika Pusat Pendidikan Interpretasi Citra dan Survei Terpadu (Puspics) UGM berdiri pada 1976, penginderaan jauh pada jenjang S1 belum ada.

Program S1 Penginderaan Jauh baru ada pada 1979, tiga tahun setelah Puspics berdiri. Dari sini dapat kita ketahui bagaimana Bakosurtanal di bawah kepemimpinan Pranoto Asmoro berhasil mendorong pendirian Puspics dan menginisiasi pendirian S1 Penginderaan Jauh di bawah Jurusan Geografi. Baru pada 1983 berdiri program S2 Penginderaan Jauh.

**ARIS PONIMAN**

Deputi Survei Dasar Sumber Daya
Alam Bakosurtanal (2001-2009)

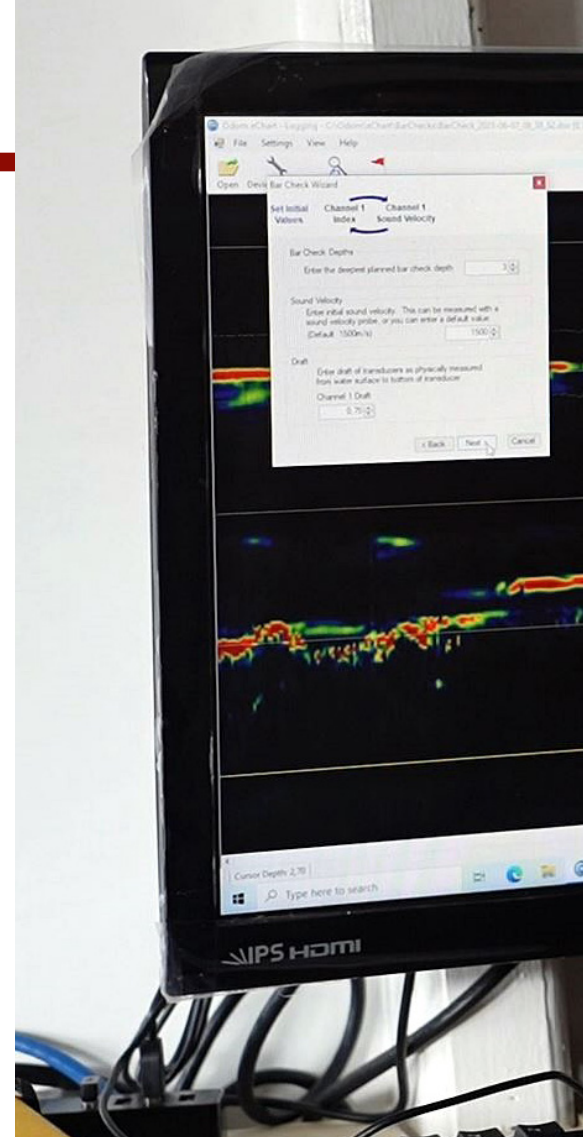
Sebagai seorang jenderal militer, Pranoto Asmoro adalah seorang yang berwibawa. Suaranya besar, tapi sangat sederhana dalam penampilan dan mampu mengayomi stafnya. Ia pun tak sungkan menerima ide-ide dari stafnya.

Salah satu yang membuat saya terkesan adalah sosoknya yang mampu mewujudkan *tut wuri handayani* (dari belakang memberikan dorongan). Ketika ide tentang kegiatan survei dan pemetaan di seluruh daerah Indonesia dikemukakan, ia berusaha menyinergikan kekuatan yang ada. (*MGI)

SURVEI BATIMETRI KARIMUNJAWA

MENGANDALKAN DUA SKEMA ECHOSOUNDER

Survei batimetri di Kepulauan Karimunjawa mengandalkan gabungan alat *Singlebeam Echosounder* dan *Multibeam Echosounder*. Masing-masing memiliki kegunaan tersendiri untuk menghasilkan pemetaan yang dibutuhkan.



Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PPKLP) Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan survei batimetri di Taman Nasional Karimunjawa, Jawa Tengah. Hasil survei akan digunakan untuk memutakhirkan data Batimetri Nasional (Batnas) dan *Digital Elevation Model Nasional* (DEMNAS), yang selanjutnya diintegrasikan dalam Peta Rupabumi Indonesia (RBI).

Survei dilakukan selama empat bulan, dari Mei hingga Agustus 2023. Ketua Tim Survei Batimetri Karimunjawa Andre Daniel Parapat menjelaskan, persiapan fasilitas penunjang di daratan sudah dilakukan sebelum survei dimulai.

"Sebelumnya kami sudah menempatkan *benchmark* (BM) di stasiun pasang surut yang akan digunakan sebagai titik kontrol," jelasnya.

Menurut Andre, survei batimetri di Karimunjawa menggunakan dua skema berdasarkan alat yang digunakan. Pertama, menggunakan *Singlebeam Echosounder* (SBES) berupa alat pemancar tunggal sinyal gelombang suara yang terpasang di badan kapal. Alat ini biasa digunakan untuk memetakan perairan dalam.

Kedua, menggunakan *Multibeam Echosounder* (MBES) berupa alat pemancar ganda sinyal gelombang suara yang terpasang menyebar di badan kapal. MBES biasanya digunakan untuk memetakan perairan dangkal.

Alat SBES digunakan selama 40 hari dan MBES 80 hari. Pengaturan ini dilakukan agar dapat memetakan seluruh kawasan Taman Nasional Karimunjawa seluas 1.100 kilometer persegi sesuai target.

"Luas area yang dipetakan dengan SBES sekitar 893 kilometer persegi. Sedangkan, yang dipetakan dengan MBES sekitar 207 meter persegi," ungkap Andre.

Survei yang dilaksanakan secara swakelola oleh BIG tersebut beberapa kali menghadapi kendala. Gangguan paling terasa adalah terpaan angin timur yang menimbulkan ombak besar, sehingga menghambat proses survei.

Tak banyak yang dapat dilakukan untuk menghadapi ombak tinggi, selain menunggu. "Kita mengejar ketertinggalan biasanya dengan *flying camp*. Jadi, *nginep* di kapal beberapa hari," kata Andre.

Meskipun ada target yang harus dipenuhi, namun keselamatan anggota tim tetap menjadi prioritas utama bagi Andre. Setiap anggota tim wajib mengikuti training *Health, Safety, and*



Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG) Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanakan survei uji implementasi standar pemetaan batimetri di Kepulauan Karimunjawa, Jawa Tengah, pada 5-11 Juni 2023.

Environment (HSE) sebelum terjun ke lokasi survei.

"Pelatihan ini membantu peserta memahami rangkaian pekerjaan di bidang HSE dan bagaimana menghadapi situasi darurat saat bekerja. Survei di laut kan risikonya besar, bagaimana cara menjaga *safety*-nya. Baru tahun ini kami punya sertifikat HSE," ujar pria kelahiran Jambi, 8 September 1991 ini.

UJI IMPLEMENTASI

Bersamaan dengan survei batimetri yang dilakukan tim dari PPKLP, Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG) BIG juga melaksanakan survei uji implementasi standar pemetaan batimetri. Survei dilaksanakan pada 5-11 Juni 2023.

Survei dilakukan untuk memutakhirkan Rancangan Standar Nasional Indonesia

(RSNI) survei batimetri, agar dokumen standar nasional yang dihasilkan dapat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nantinya, dokumen standar tersebut dapat dipakai siapa pun untuk kepentingan survei batimetri. Mulai dari dokumen perencanaan, pelaksanaan survei, pengambilan data, pengolahan, hingga kontrol kualitas.

Survei uji implementasi dilakukan dengan instrumentasi pemeruman di kapal menggunakan SBES dan MBES. Pemeruman (*echosounding*) merupakan proses dan aktivitas untuk memperoleh gambaran (model) bentuk permukaan (topografi) dasar perairan (*seabed surface*).

Ada sembilan proses atau klausul dalam survei uji implementasi, yaitu ketelitian orde yang digunakan; penyediaan titik kontrol; pengamatan pasang surut (pasut); pengukuran

gelombang suara; kalibrasi alat; pemeruman SBES dan MBES; serta koreksi sumber kesalahan dalam pemrosesan data.

Staf PSKIG Garri Martha Kusuma Wardhana menjelaskan, klausul ini diperlukan untuk menguji apakah titik kontrol yang dibangun dan diproses sudah sesuai dengan RSNI atau belum. Kalau belum, pihak PSKIG akan melakukan menyesuaikan pada RSNI atau *benchmark*.

PSKIG menargetkan pembaharuan RSNI survei batimetri tuntas pada Desember 2023. Sehingga dapat berlanjut menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Jika survei uji implementasi telah selesai dilakukan, akan dilanjutkan dengan rapat teknis untuk konsensus. Tahap terakhir adalah penetapan RSNI menjadi SNI," pungkas Garri. (*MGI)

SURVEI ATLAS PARIWISATA LABUAN BAJO

“BIG menghimpun potensi wisata yang populer maupun belum dikenal luas dalam bentuk atlas pariwisata. Masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai literasi geospasial.”

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) BIG menyelenggarakan kegiatan Survei Lapangan Penyusunan Atlas Pariwisata di Wilayah Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 10-19 Mei 2023.

BIG menghimpun potensi wisata yang populer maupun belum dikenal luas dalam bentuk atlas pariwisata. Masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai literasi geospasial. Pemerintah Indonesia tengah meluncurkan Program Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) untuk mengembangkan sejumlah destinasi wisata lain di luar Bali. Program ini diyakini mampu mendongkrak industri pariwisata Indonesia setelah sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19.

Badan Informasi Geospasial (BIG) berpartisipasi dalam Program DPSP dengan membuat atlas pariwisata di sejumlah daerah. Atlas pariwisata berisi informasi yang menggambarkan daya tarik wisata, meliputi: unsur kewilayahan, aksesibilitas, atraksi, amenitas, investasi, serta desa wisata. Termasuk informasi tentang adat istiadat dan budaya yang berlaku di masyarakat setempat.

Berbagai unsur di atas dikemas dalam beragam Informasi Geospasial (IG) berupa peta, citra, dan penampakan tiga dimensi. IG tersebut kemudian dikombinasikan dengan narasi deskriptif dan dilengkapi foto, serta infografis menarik.

Salah satu destinasi wisata yang menjadi sasaran utama DPSP pada 2023 adalah Labuan Bajo. Pada 10-19 Mei 2023, tim dari Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) melakukan Survei Penyusunan Atlas Pariwisata di Wilayah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Zidni Farhati Silmi, penanggung jawab Survei Penyusunan Atlas Pariwisata di Wilayah Labuan Bajo, menjelaskan pihaknya sempat menyambangi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Labuan Bajo, Balai Taman Nasional Komodo untuk mengetahui gambaran umum keadaan wisata. Selanjutnya, dilakukan identifikasi daya tarik wisata, desa wisata, dan fasilitas penunjangnya.

DARATAN & KEPULAUAN

Survei dilakukan di dua wilayah, yaitu daratan dan kepulauan. Survei daratan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan sebagian Manggarai, antara lain: Wae Rebo, Gua Batu Cermin, Puncak Waringin, dan Rumah Tenun Baku Peduli.

Survei daratan dilakukan selama empat hari oleh sembilan orang yang dibagi dalam tiga kelompok. Pembagian ini mengacu pada akses dari Peta Rupabumi Indonesia (RBI) dan informasi Google Maps.

"Masing-masing tim menyebar ke tempat yang memiliki daya tarik wisata di Kabupaten Manggarai

Barat dan Manggarai. Itu lokasinya masih cukup berdekatan," tutur lulusan Jurusan Topografi dan Penginderaan Jauh Universitas Gadjah Mada ini.

Sedangkan, survei kepulauan dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai pulau-pulau di sekitar Labuan Bajo. Pulau yang dimaksud, antara lain: Pulau Kelor, Manjarite, Padar, Komodo, dan Pulau Kalong.

Survei kepulauan membutuhkan waktu tiga hari yang dilakukan oleh sembilan orang. Setelah berkoordinasi dengan penyedia kapal di Taman Nasional Komodo, anggota tim dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari lima dan empat orang.

"Survei di kepulauan harus mempertimbangkan kondisi pasang surut dan arus. Jadi, kami beberapa kali komunikasi dengan pihak kapal dan memutuskan lokasi sesuai anjurannya," terang Zidni.

Kelompok pertama bergerak menuju rute yang biasa dikunjungi wisatawan, seperti Pulau Padar dan Komodo. Kelompok kedua mengunjungi tempat wisata yang tidak biasa menjadi trip wisatawan atau rute yang jarang ditempuh.

Tim survei sengaja mendatangi tempat-tempat 'tak biasa' ini untuk menambah konten dan meng- *highlight* wisata di Labuan Bajo. "Agar kita promosikan juga. Ada tempat wisata lain yang di kawasan Labuan Bajo ini," imbuh Zidni.

Menurut Zidni, tahun ini *output* survei berupa *e-atlas*. Bukan lagi dalam bentuk buku cetak seperti yang pernah dilakukan tim survei PPTRA. *E-atlas* tersebut akan ditambah dengan konten lain, seperti *story map* dan peta multitema, sehingga dapat berfungsi sebagai literasi geospasial bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat Pius Baut mengatakan jika Survei Penyusunan Atlas Pariwisata Labuan Bajo yang dilakukan PPTRA ini membangkitkan semangat pemerintah daerah (pemda) setempat. Ia mengaku butuh alat untuk menyebarluaskan informasi yang dapat meningkatkan daya tarik wisatawan terhadap objek wisata di Labuan Bajo dan sekitarnya.

"Kami berterima kasih atas kerja sama BIG yang membantu menghasilkan atlas objek wisata. Kami berharap kerja sama ini dapat terjalin terus, supaya banyak hal yang bisa kita kolaborasikan," pungkasnya. (*MGI)

SURVEI USV UNTUK PENGAMATAN GARIS PANTAI



Surveyor Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai melaksanakan survei batimetri dengan menggunakan Unmanned Surface Vehicle (USV) pada 14 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

“Wahana tanpa awak ini membantu pelaksanaan survei batimetri di wilayah yang sulit diakses oleh kapal besar.”

Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PPKLP) Badan Informasi Geospasial (BIG) menargetkan survei batimetri seluas 50.000 kilometer persegi di Indonesia rampung pada 2024. Survei batimetri dilakukan untuk penggambaran garis kontur kedalaman dasar laut, yang meliputi pengukuran, pengolahan, hingga visualisasi.

Pelaksanaan survei batimetri biasanya menggunakan kapal besar yang diawaki operator dan surveyor. Kapal untuk survei dipasang sejumlah alat sensor.

Khusus untuk wilayah yang sulit diakses dengan kapal—seperti perairan dangkal dekat pantai—dilakukan pengamatan dengan metode *Satellite Derived Bathymetry* (SDB). SDB adalah metode alternatif untuk mendapatkan data batimetri menggunakan sumber data dari citra satelit optis.

Proses pengamatan menggunakan wahana apung tanpa awak atau populer dengan sebutan *Unmanned Surface Vehicle* (USV). Pemeruman (tindakan pengukuran kedalaman) pada survei menggunakan USV dilakukan untuk memverifikasi data kedalaman dari pencitraan satelit.

Survei menggunakan USV sama dengan metode survei batimetri konvensional yang mengamati kedalaman dan topografi dasar laut. USV dioperasikan melalui *remote control*, mirip pengoperasian *drone*.

Wahana USV memiliki sistem mandiri (*autonomous*) yang dilengkapi sensor antitabrakan (*collision avoidance*) dan fungsi kembali ke titik awal (*home return*) apabila survei sudah selesai dilakukan. Wahana juga dapat diatur agar kembali ke titik awal jika baterai akan habis.

PENGAMATAN GARIS PANTAI

Pada 9-23 Mei 2023, PPKLP melakukan survei menggunakan USV di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Survei dilakukan untuk menyediakan *Digital Elevation Model* (DEM) pantai dan data garis pantai.

USV dilepas ke perairan dan bergerak dalam jarak terkontrol selama satu hingga dua jam. Meski dapat terpantau dalam radius dua kilometer, surveyor tetap memastikan wahana USV bergerak tak lebih dari satu kilometer.

“Paling jauh, jarak yang kita berani tempuh cuma 800 hingga 900 meter. Kita khawatir wahana akan hilang atau kena ombak jika jaraknya terlalu jauh. Meskipun konsepnya sama seperti *drone* yang akan kembali di titik awal, ada kemungkinan kalau USV ini *nyangkut* atau terbalik,” terang Rifqi Muhammad Harrys, surveyor di PPKLP.

Menurut Rifqi, penggunaan USV pada pengamatan garis pantai perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, yaitu sebaiknya diterapkan pada perairan dangkal dan jernih.

“Waktu pengoperasiannya juga dipilih yang tepat. Saat survei di Buton, Sulawesi Utara, USV sengaja digunakan saat air laut sedang pasang untuk menghindari pasang surut ekstrem yang bisa membahayakan USV,” jelasnya.

CARA KERJA SURVEI USV

Sesuai dengan fungsinya, USV dapat beroperasi di permukaan perairan tanpa awak. Pada prinsipnya, USV digunakan survei bidang oseanografi, meteorologi, industri minyak, dan gas.

USV juga dapat dimanfaatkan untuk survei di perairan tercemar yang telah terkontaminasi nuklir, biologi, atau bahan kimia. Adapun tahapan kerja USV sebagai berikut:

1. Melakukan pengamatan *Global Navigation Satellite System* (GNSS) untuk memperoleh koordinat *base*. Pemilihan lokasi *base* mempertimbangkan pada area terdekat dengan lokasi pemeruman yang terbuka, dan aman dari gangguan
2. Pemasangan radio telemetri untuk komunikasi antara USV dan *Ground Control Station* (GCS), sehingga dapat saling memberikan informasi.
3. Pemasangan USV. Bagian-bagian USV terdiri dari baterai, sayap, dan antena-antena. Setelah semua bagian USV terpasang, USV dinyalakan dan dikoneksikan dengan *remote* dan laptop survei melalui aplikasi *Auto Planner* serta *Hydrosurvey*.
4. Melakukan pemeruman yang diawali dengan pembuatan lajur, terdiri dari lajur utama dan lajur silang. USV akan bergerak otomatis mengikuti lajur yang dibuat. USV yang sedang melakukan pemeruman akan terus diawasi oleh *observer* dengan menggunakan binokular. Data perum diakuisisi menggunakan aplikasi *Hydro Survey*. Pilot USV bertugas mengendalikan USV secara manual apabila USV berdekatan dengan rintangan atau koneksinya terputus.
5. Melakukan pengunduhan data dengan menggunakan radio telemetri dan WIFI. Pada USV data yang diambil adalah *raw data* pemeruman, PPK dan MRU. Data GNSS di *base* juga di-*download* menggunakan WIFI dan *bluetooth*. Pengunduhan data GNSS dilakukan pada saat durasi pengamatan sudah sesuai dengan kebutuhan.
6. Pembongkaran Base GNSS dan telemetri, serta pembersihan USV. Tujuannya untuk melakukan pengecekan eksterior apakah ada kerusakan atau ada benda yang tersangkut di *propeller*.
7. Melakukan pengolahan data yang terdiri dari pengolahan GNSS *base station*, pengolahan *trajectory* USV dan pengolahan data kedalaman hasil pemeruman USV. Pengolahan GNSS *base station* menggunakan aplikasi *Trimble Business Center* (TBC). Data yang digunakan dalam pengolahan ini adalah *raw data* GNSS dalam format HCN /*rinex* dan data CORS. (*MGI)

PENYELENGGARAAN RUPABUMI INDONESIA DIAPRESIASI DUNIA

“Pembinaan teknis jadi kunci keberhasilan penyusunan nama rupabumi di Indonesia.”

Indonesia sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan *International Training on Toponymy 2023*. Kegiatan yang dilaksanakan Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama *United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN)* pada 19-23 Juni 2023 ini diikuti 132 peserta dari dalam dan luar negeri.

Berbagai materi pelatihan penamaan rupabumi disampaikan para pakar nasional dan internasional. Saat praktik *field data collection* atau pengumpulan nama rupabumi menggunakan *software open source*, peserta diajak ke Pura Tirta Empul dan Goa Gajah di Kabupaten Gianyar.

Bali sengaja dipilih sebagai tempat pelatihan toponimi internasional bukan tanpa alasan. “Bali mempunyai keunikan yang menempatkan budaya sebagai aspek utama. Ini menjadikan Bali sebagai tempat ideal untuk mengadakan pelatihan dan sosialisasi toponimi sebagai warisan budaya,” jelas Kepala BIG Muh Aris Marfai saat konferensi pers usai membuka *International Training on Toponymy* pada 19 Juni 2023.

Aris berharap, *International Training on Toponymy* dapat membantu memberikan pemahaman mendalam akan pentingnya toponim sebagai warisan budaya. Toponim juga memiliki peran dalam melestarikan nilai budaya di masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT) BIG Ade Komara Mulyana menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam penyelenggaraan *International Training on Toponymy* bukan hal baru. Ini kali keempat Indonesia menjadi pelaksana setelah 2005, 2007, dan 2012.

“Seharusnya Indonesia menjadi tuan rumah *International Training on Toponymy* pada 2020. Tapi, kala itu dunia tengah dilanda pandemi COVID-19 sehingga kegiatan baru bisa dilaksanakan tahun ini,” terang Ade.

Menurut Ade, *International Training on Toponymy* merupakan momen bagi BIG untuk dapat mengenalkan betapa pentingnya nama baku rupabumi. Bahkan, dunia internasional begitu peduli dan gigih melaksanakannya.

Pada hari terakhir *International Training on Toponymy*, dilaksanakan pertemuan *United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) Asia South-East Division (ASED)* ke-12 secara *hybrid*. Forum ini dipimpin oleh Ketua UNGEGN ASED Nor Zetty Akhtar Haji Abdul Hamid dan menghasilkan beberapa resolusi.

Resolusi yang dihasilkan, antara lain: bahwa negara anggota UNGEGN ASED setuju mendukung UNGEGN ASED *Work Plan 2022-2026* dan sepakat membentuk *Technical Committees* untuk mengimplementasikan dan mengawasi *Divisi Work Plan*.

CAPACITY BUILDING

Indonesia sangat serius melaksanakan pembakuan nama rupabumi. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagai acuan pelaksanaan di lapangan.

Indonesia juga memiliki aplikasi Sinar yang dapat mempermudah aktivitas pembakuan nama rupabumi. Aplikasi ini meraih penghargaan sebagai ‘Top 99 Inovasi Pelayanan Publik’ di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2023.

Selain itu, Indonesia juga secara berkala menerbitkan *Gazeter Republik Indonesia* dan berkontribusi dalam pembuatan *bulletin* UNGEGN. Berbagai upaya dan strategi Indonesia dalam mewujudkan penamaan rupabumi telah disampaikan dalam sesi *national dialogue* saat pertemuan UNGEGN di New York, Amerika Serikat pada 4 Mei 2023.

Selaku kepala delegasi Republik Indonesia, Aris mempresentasikan progres dan strategi kegiatan





Peserta International Training on Toponymy saat praktik pengumpulan nama rupabumi menggunakan software open source, di Pura Tirta Empul, Bali pada 22 Juni 2023.

pembinaan teknis nama rupabumi hingga ke level daerah. Disampaikan pula bahwa pembinaan teknis yang dilakukan secara terus-menerus telah meningkatkan jumlah data dan pengguna nama rupabumi secara signifikan dari 2020 hingga 2022.

"Jumlah data meningkat hingga 267 persen dan jumlah pengguna meningkat 361 persen. Data-data nama rupabumi yang telah berhasil dihimpun, dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti manajemen kebencanaan gempa bumi yang dilakukan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada 2021," urai Aris.

Presentasi Indonesia tersebut mendapat apresiasi dari banyak pihak, karena memberikan informasi lengkap seputar penyelenggaraan rupabumi. Bahkan sampai pada *capacity building*.

Sementara, menurut Ade Komara, delegasi negara lain hanya menjelaskan sisi regulasi masing-masing. Salah satu negara yang tertarik dengan presentasi Indonesia adalah Jepang, yang mengungkapkan bahwa langkah Indonesia yang memberikan insentif merupakan langkah tepat untuk menjaga hubungan pemerintah pusat dengan daerah dalam memajukan penyelenggaraan nama rupabumi.

"Mungkin kegiatan kita memberikan bimbingan teknis (bimtek) ke pemda-pemda itu menarik (bagi mereka),

sehingga kita diminta melakukan presentasi di *country report*, khusus untuk *capacity building*. Jepang yang merupakan negara maju pun, masih kesulitan dalam membina sumber daya manusia (SDM) di tingkat daerah," tutur Ade.

Tak heran, bila kemudian Jepang `meniru` Indonesia dalam penyelenggaraan rupabumi. "*I wish Japan, is as good as Indonesia*" tutur Ade menirukan ucapan delegasi Jepang.

STANDAR INTERNASIONAL

Ade mengungkapkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat berkepentingan dengan nama rupabumi yang mengikuti standar internasional. Sehingga setiap negara dapat saling berkomunikasi.

Kesamaan standar dibutuhkan karena setiap negara memiliki bahasa dan huruf yang berbeda. Seperti Arab, Cina, dan Jepang yang tidak menggunakan huruf latin.

"Setiap nama rupabumi harus disertai dengan huruf latin. Itu adalah prinsip yang ditetapkan PBB. Silahkan punya huruf lokal, tapi tetap harus ada pakai huruf latin. Itulah dasar yang kita ambil mengapa muncul 10 prinsip nama rupa bumi di PP Nomor 2 Tahun 2021. Kita mengacu pada standar internasional dari UNGEGN," tegas Ade. (*MGI)



Sebanyak 15 orang dinyatakan lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Badan Informasi Geospasial (BIG) dan mulai menjalani masa orientasi pada 3 Juli 2023.

REFORMULASI SELEKSI PPPK

“Seleksi PPPK 2022 pada Badan Informasi Geospasial meluluskan 15 orang. Sedikitnya jumlah peserta yang lolos disebabkan *passing grade* terlalu tinggi, atau kualitas kapabilitas pelamar yang di bawah standar kebutuhan?”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan bahwa ASN terbagi dalam dua bagian, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meskipun keduanya termasuk ASN, PNS, dan PPPK mempunyai definisi, hak, manajemen, dan proses seleksi yang berbeda.

PNS adalah ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan

memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan, PPPK adalah ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh PPK sesuai kebutuhan instansi dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

PPPK lebih sering dikenal dengan sebutan pegawai tidak tetap atau tenaga kontrak, yang wajib menjalankan tugas selayaknya ASN. Posisinya ditempatkan sebagai tenaga fungsional yang bekerja sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

Perbedaan PNS dan PPPK di antaranya:

- PNS memiliki jenjang karir dan berkesempatan menempati jabatan pimpinan utama. Sedangkan, PPPK hanya bisa menempati jabatan pimpinan utama dan madya melalui *open bidding*.
- PNS mendapatkan uang tunjangan hari tua (pensiunan) dan bisa mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Sedangkan, PPPK tidak mendapatkan fasilitas ini.

Peran strategis PPPK selayaknya dikelola dengan sistem manajemen profesional di setiap instansi pemerintah, sehingga menghasilkan pegawai ASN yang kompeten, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PPPK BIG

Guna memenuhi kebutuhan jumlah tenaga yang dibutuhkan, BIG membuka ruang untuk ASN PPPK. Mengacu pada surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 Tanggal 19 Desember 2022, BIG melakukan seleksi penerimaan PPPK tahun 2022.

Formasi dibuka untuk 34 posisi, dengan pembagian 26 fungsional ahli dan delapan fungsional terampil. Formasi ahli pertama, yaitu analis kebijakan, arsiparis, pengelola barang/jasa, pengembangan teknologi pembelajaran, perencana, pranata hubungan masyarakat, pranata komputer, dan surveyor pemetaan. Untuk formasi terampil, yaitu arsiparis, pranata hubungan masyarakat, pranata sumber daya manusia aparatur, dan surveyor pemetaan.

Tes seleksi dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dari 34 formasi yang dibuka, ternyata hanya 15 orang yang lulus tes.

Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum (PKH) BIG Akhmad Yulianto Basuki menjelaskan, BIG pada awalnya mengusulkan 94 formasi PPPK. Tetapi yang disetujui BKN hanya 34 formasi.

"Sedikitnya peserta yang lolos seleksi karena berlakunya skema *passing grade*, yang mensyaratkan adanya sertifikasi

dari formasi yang dilamar. Seperti formasi komputer harus mempunyai sertifikasi A, B, dan C ditambah pengalaman bekerja di bidang yang diminati minimal dua tahun," jelas Akhmad.

Menurut Akhmad, banyak peserta seleksi PPPK BIG mengeluhkan *passing grade* yang terlalu tinggi. Namun, tidak dipungkiri jika *passing grade* ini menjadi penyaring kualitas ASN yang bekerja pada instansi pemerintah.

"*Passing grade* sudah ditetapkan oleh regulasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan implementasi dari BKN. Kita mengirimkan (nama-nama) calon dari sistem BKN. Teman-teman di sini lebih banyak datang untuk mengawasi bahwa prosesnya benar, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan keseluruhan tahapan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan," tutur Akhmad.

Pada 2023, BIG kembali mengajukan 177 formasi ASN. Saat tulisan ini diturunkan, masih menunggu persetujuan BKN mengenai jumlah yang akan diterima BIG.

REFORMULASI

Kementerian PANRB mengakomodir masukan dari berbagai pihak mengenai rendahnya kelulusan seleksi PPPK. Hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 pada 2 Agustus 2023.

Optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan PPPK 2022 dilakukan untuk jabatan yang belum terpenuhi dari hasil seleksi yang dilaksanakan berdasarkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis. Reformulasi ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi, dengan batasan bahwa penilaian berlaku untuk peserta eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) atau non-ASN.

"Eks THK-II merupakan nama yang terdaftar pada pangkalan data THK pada BKN yang melamar pada instansi pemerintah tempat ia bekerja atau melamar pada instansi yang berbeda. Sedangkan non-ASN adalah peserta di luar eks THK-II yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya pada seleksi PPPK teknis tahun 2022," terang Akhmad.

Keputusan Menteri PANRB tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan formasi yang belum terpenuhi dari hasil seleksi PPPK Tahun 2022, dengan tujuan kinerja pemerintah dapat berjalan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada. ^(MGI)

GUNUNG API TIPE A DI WILAYAH **BALI-NUSA TENGGARA**



Indonesia memiliki 127 gunung api. Sebanyak 69 di antaranya termasuk gunung api aktif dan berada di bawah pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).



Berdasarkan letusannya, gunung api terdiri tiga jenis, yaitu:

- Gunung api tipe A berjumlah 76. Merupakan gunung api yang memiliki catatan sejarah letusan sejak 1600.
- Gunung api tipe B berjumlah 30. Merupakan gunung api yang memiliki catatan sejarah letusan sebelum 1600.
- Gunung api tipe C berjumlah 21. Merupakan gunung api yang tidak memiliki catatan sejarah letusan, tetapi masih memperlihatkan jejak aktivitas vulkanik.



Di balik ancaman letusannya, gunung api menyimpan sumber daya alam yang dapat mendatangkan manfaat.



Badan Informasi Geospasial (BIG) memetakan manfaat sumber daya alam di sekitar gunung api di Indonesia sejak 2018 dan menyusunnya dalam bentuk Atlas Bentang Sumber Daya Lahan Gunung Api. Atlas ini untuk mengulas aspek sumber daya dari sisi pemanfaatan lahan oleh masyarakat di sekitar kawasan gunung api.



Khusus 2023, telah dilaksanakan penyusunan Atlas Bentang Sumber Daya Lahan Gunung Api tipe A di Bali-Nusa Tenggara.



Di Bali–Nusa Tenggara terdapat
21 gunung api tipe A

- Sebanyak 19 gunung api berada di pulau utama dan tiga lainnya di laut.
- Terdapat gunung api yang bentuknya secara utuh sulit dikenali karena tidak seperti gunung api pada umumnya. Contoh: Gunung Anak Ranakah, Gunung Ine Lika, dan Gunung Lereboleng.



Drs. Tito Setiawan, M.M.

Kepala Biro Umum dan Keuangan BIG

KERJA SAMA ITU PENTING!

“Ia bertekad menjadikan Biro Umum dan Keuangan sebagai unit layanan andal, yang siap bekerja sama dengan unit lain untuk memajukan BIG.”

Pertengahan Juni 2023, Tito Setiawan resmi dilantik sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan (Kabiرو UK) Badan Informasi Geospasial (BIG). Jabatan ini diembannya setelah menyelesaikan tugas sebagai Kepala Biro Umum di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves).

Bagi Tito, jabatan barunya di BIG semacam perjalanan ‘pulang’. BIG bukanlah lembaga baru baginya, karena ia pernah menapaki karir sebagai Kabiرو UK di lembaga yang bertugas di bidang Informasi Geospasial (IG) ini sebelumnya.

Tito mulai bertugas di Kemenkomarves pada 2015 yang kala itu baru saja dibentuk. Setelah delapan tahun mengabdikan di kementerian yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan, Tito kembali mendapatkan amanah di BIG.

Pria kelahiran 4 Mei 1968 ini mengawali tugasnya di BIG dengan merumuskan visi dan misi sebagai Kabiرو UK. Ia juga merancang berbagai program yang akan dilakukan dalam jangka pendek dan panjang.

CEPAT TANGGAP

Program pertama yang dirumuskan Tito adalah menjadikan Biro UK sebagai unit layanan yang andal. “Biro UK harus cepat tanggap memberikan layanan kepada siapa saja yang membutuhkan,” tegasnya.

Menurut Tito, Biro UK merupakan pusat layanan di lingkungan BIG. Namun, ia mendapat informasi jika banyak pihak yang memberikan saran atau keluhan kepada Biro UK belum sempat ditanggapi.

“Saya sampaikan ke teman-teman di Biro UK, keluhan itu yang penting kita tanggapi dulu. Kalau bisa, ya laksanakan. Kalau tidak, kasih alasan. Kalau dijelaskan, mungkin (yang mengeluh) bisa mengerti. Ini lebih baik dari pada dibiarkan,” katanya.

Untuk rencana jangka pendek, Tito berusaha mengatasi permasalahan fasilitas di BIG. Saat ini, banyak fasilitas pendukung pekerjaan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Pintu yang macet, kebocoran, toilet bermasalah, dan barang-barang bekas yang bertumpuk di beberapa tempat. Semua permasalahan ini akan coba kita benahi segera. Selain itu, keluhan terkait kucing liar yang semakin banyak berkeliaran di BIG juga akan saya tindak lanjuti,” ucapnya.

Kemudian untuk program jangka panjang sudah direncanakan renovasi gedung. Ia mengatakan, telah diminta Kepala BIG untuk merenovasi gedung BIG yang sudah tua.

“Tentunya renovasi ini tidak terlepas dari penganggaran. Kita harus mengoptimalkan yang ada,” imbuh Tito.

Tito juga akan menggerakkan jajarannya untuk membenahi dan mengoptimalkan pemanfaatan aset BIG yang ada di luar kota, seperti Parangtritis Geomaritime Science Park (PGSP). PGSP merupakan etalase BIG untuk mengenalkan IG kepada khalayak.

Guna mewujudkan rencananya, Tito pun menyambangi PGSP. Menurutnya, ada sejumlah fasilitas yang harus diperbaiki.





Kepala Biro Umum dan Keuangan BIG Drs. Tito Setiawan, MM.

“Sumber daya manusia (SDM) tentunya juga menjadi perhatian utama. Saat ini, para tenaga di PGSP mengalami kendala beraktivitas karena terbatasnya sarana mobilitas,” ucapnya.

Penggunaan transportasi umum di Parangtritis tidak leluasa seperti di ibu kota maupun kota besar lainnya. Tito pun terpikir untuk memberikan fasilitas kendaraan kepada tenaga di PGSP yang menjadi ujung tombak di lapangan.

SINERGI

Tito menyadari, Biro UK harus berperan aktif dalam memajukan BIG. Tetapi Biro UK tak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi dengan unit-unit lain. Apa yang dilakukan akan sangat bermakna bila diikuti pula oleh unit-unit lain. Menurut Tito, memang secara struktural BIG terbagi ke dalam berbagai pusat atau unit, tetapi sesungguhnya antara satu unit dengan yang lain saling membutuhkan. Karena itu dibutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk kepentingan bersama.

“Dalam sebuah organisasi, kerja sama penting. Saling membantu. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman, bantulah orang lain yang membutuhkan. Karena suatu saat kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian saling mendoakan dalam satu BIG, walau kita belum saling kenal,” urainya.

Untuk memajukan BIG, lulusan *magister* dari *Development Management*, University of Philippines ini mengajak semua orang untuk berpikir positif, dan tak mudah larut dalam masalah. Setiap masalah harus dihadapi dan dicarikan solusi. Jangan dihindari dan jangan pula diperbesar.

Tito berpandangan bahwa masalah dan solusi merupakan warna-warni kehidupan, yang akan membuat hidup terasa semakin indah dan bermakna.

“Seandainya matahari adalah kemudahan dan hujan adalah kesulitan, maka kita butuh keduanya untuk melihat indahnya pelangi,” pungkas penggemar sepak bola ini.

TIDAK TOLERIR KEBOHONGAN

Ternyata, bekerja di BIG sudah menjadi impian Tito sejak lama. Ketika masih bekerja di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemendukokesra) di Jakarta, ia selalu melewati BIG setiap berangkat dan pulang kerja. Kala itu, terbesit dalam hatinya untuk bisa bekerja di BIG.

Keinginan ini diungkapkan dalam doa-doanya. Bahkan, ia juga minta didoakan oleh sang ibu.

"Yang penting itu doa orang tua. Doa orang tua itu pasti makbul," ungkapnya.

Belakangan, ketika Tito bertugas di Kemenkomarves, keinginan untuk bergabung dengan BIG kembali muncul. Keinginan itu pun kembali terwujud pada 2023 ketika dibuka seleksi terbuka untuk jabatan sebagai Kabiro UK di BIG.

"Seperti *deja vu*," ujar Tito.

Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Tito mengikuti seleksi tersebut dan melengkapi segala prosedur yang disyaratkan.

KEJUJURAN

Satu hal yang selalu dipegang erat oleh Tito, yaitu kejujuran. Bahkan ketika wawancara, dengan jujur ia mengatakan alasan mengikuti seleksi terbuka adalah lokasi BIG yang dekat dengan tempat tinggalnya.

"Saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan staf, bahwa bohong dan salah itu berbeda. Saya masih bisa menoleransi kesalahan, karena kesalahan itu bisa diperbaiki. Tapi, bohong itu tidak bisa diperbaiki. Biasanya, jika sudah sekali bohong, akan bohong lagi. Jadi, bohong bisa *multilevel*. Saya tidak bisa menoleransi kebohongan," tegas pria yang mengaku setiap hari selalu hadir di kantor pukul 07.00 WIB ini.
(*MGI)

Drs. Tito Setiawan, M.M.

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 Mei 1968

Riwayat Pendidikan:

- SMA Negeri 3 Bandung, lulus 1987
- S1 Jurusan Administrasi Negara, Universitas Padjadjaran, lulus 1992
- S2 Development Management, University of Philippines, lulus 2003

Riwayat Pekerjaan:

- Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2009-2013)
- Kepala Biro Umum dan Keuangan Badan Informasi Geospasial (2013-2015)
- Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (2015-2019)
- Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (2019-2023)
- Kepala Biro Umum dan Keuangan Badan Informasi Geospasial (2023)



BIG UPAYAKAN PEMBAHARUAN DATA SPASIAL SAWIT



Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai hadir dalam rapat koordinasi dan konferensi pers Pelaporan Mandiri Pelaku Usaha dalam Rangka Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, di Jakarta pada 23 Juni 2023.

Tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia diliputi berbagai permasalahan, sehingga tidak optimal dalam mendukung penerimaan negara. Hal ini mendorong pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2023 untuk membentuk Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam hal ini Badan Informasi Geospasial (BIG) dilibatkan sebagai anggota satgas pengarah, yang bekerja di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang ditetapkan sebagai Ketua.

Pada tanggal 23 Juni 2023 Satgas Sawit mengadakan rapat di Jakarta. Pada kesempatan ini, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan salah satu masalah yang timbul adalah sekitar 3,3 juta hektar perkebunan sawit berdiri di atas kawasan hutan. Ini jelas menyalahi aturan.

Luhut mengatakan semestinya para pelaku usaha di bidang kelapa sawit—baik perusahaan, koperasi, maupun petani rakyat—memberikan data ruang lingkup bisnis yang sebenarnya, dan disiplin melaporkan kondisi perkebunannya kepada instansi terkait secara mandiri. Bila terjadi pelanggaran, pemerintah tak segan memberikan sanksi hukum sesuai dengan pasal 110a dan pasal 110b Undang-Undang Cipta Kerja.

“Pemerintah akan menindak tegas pelaku usaha yang tidak menghiraukan segala usaha yang dilakukan pemerintah

untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit ini,” kata Luhut.

DATA SPASIAL UP TO DATE

Sebelumnya pada 26 April 2023, Kepala BIG Muh Aris Marfai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko guna membangun kesepahaman bersama mengenai rencana kerja rekonsiliasi dan pembaharuan data spasial Tutupan Kebun Kepala Sawit Nasional.

BRIN memiliki citra satelit penginderaan jauh (inderaja) hasil akuisisi terbaru yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam rekonsiliasi dan pembaharuan data spasial. Melalui pertemuan ini diharapkan terwujud ketersediaan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Tutupan Kebun Kelapa Sawit Skala 1:50.000 yang telah diperbaharui (*up to date*) dan dapat disinkronisasikan dengan IGT Kelapa Sawit lainnya, sehingga terbangun basis data spasial kelapa sawit nasional *by name by address*.

Data ini berguna untuk penerbitan perizinan seperti Ijin Lokasi Perkebunan (ILOK Perkebunan), Ijin Usaha Perkebunan Sawit (IUP) serta data penguasaan lahan seperti Hak Guna Usaha (HGU) komoditas kelapa sawit.

“Untuk memastikan penyelenggaraan tata kelola sawit yang lebih baik, maka basis data spasial terkait perkebunan kelapa sawit dituntut dalam kondisi yang *update* dan akurat. (Ini) harus segera diwujudkan,” tegas Aris. (*MGI)

BIG DUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana menyambangi Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 13 Juli 2023. Kedatangannya jauh-jauh dari wilayah paling timur Indonesia itu untuk menandatangani Nota Kesepahaman (NK) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Bintang dengan BIG dalam hal meningkatkan kualitas data, informasi, dan infrastruktur geospasial daerah yang akurat dan terkini.

"Dengan ditandatanganinya NK antara Pemkab Pegunungan Bintang dan BIG, saya sangat berharap dapat memanfaatkan secara optimal peran data dan Informasi Geospasial (IG) demi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pegunungan Bintang," ujar Spei Yan Bidana.

Spei Yan Bidana menyadari, wilayahnya merupakan daerah konservasi hidrologi. Sekitar 80 persen wilayah Pegunungan Bintang merupakan daerah hutan, dengan sumber mata air yang memasok aliran sungai ke seluruh penjuru Papua Pegunungan.

Maka, dibutuhkan pemetaan yang komprehensif agar pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak mengganggu konservasi ekosistem Pegunungan Bintang.

"Pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang harus terencana dengan baik, karena di wilayah ini juga terdapat kandungan mineral berupa emas yang terintegrasi langsung dengan cekungan minyak," imbuh Spei Yan Bidana.

Menurut Spei Yan Bidana, pemanfaatan sumber daya alam yang ada haruslah mengacu pada IG agar upaya pembangunan dapat mencapai target. Salah satunya, Papua Pegunungan bercita-cita tidak lagi memakai energi bahan bakar minyak pada 2040.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BIG Muh Aris Marfai menyampaikan pihaknya siap mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pegunungan Bintang. Ia pun siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan di sana.

"Melalui kerja sama ini, kita dapat mempercepat pengembangan dan pembaruan data dan IG yang akurat dan terkini. Semoga upaya ini dapat membantu Pemkab Pegunungan Bintang dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik," tutur Aris. (*MGI)



Kepala BIG Muh Aris Marfai (berbaju putih di tengah) dan Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana (menggunakan topi) berfoto bersama selepas menandatangani Nota Kesepahaman (NK) antara BIG dengan Pemkab Pegunungan Bintang di ruang rapat utama, gedung A pada 13 Juli 2023.



**BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL**



Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai (kanan) disambut hangat Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad (kiri) dalam audiensi yang diselenggarakan di Jakarta pada 10 Juli 2023.

STANDARDISASI INFORMASI GEOSPASIAL BERKUALITAS

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai melakukan audiensi dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad. Pertemuan ini untuk membahas implementasi kerja sama yang telah terbangun antara BIG dan BSN, khususnya terkait standar dan kompetensi guna menunjang percepatan pemetaan skala besar.

Aris mengatakan, BIG perlu bersinergi dengan BSN untuk menyelesaikan pekerjaan penting berupa pemetaan skala besar. Khususnya dalam menghadapi sektor swasta yang harus dikoordinir dengan sertifikasi dan akreditasi.

"Kita menjadi core utama penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) di Indonesia. Kita harus menjamin kualitas, dan itu memerlukan standar," tegas Aris saat audiensi di kantor BSN pada 10 Juli 2023.

Menurut Aris, diperlukan perencanaan yang matang dan agenda yang tepat untuk percepatan penyelesaian pemetaan skala besar. Prosesnya pun harus dilakukan dengan cepat, karena kebutuhan terhadap peta dasar skala besar saat ini begitu mendesak.

Nantinya, lanjut Aris, produk yang dihasilkan BIG akan dimanfaatkan di sektor hulu hingga hilir. Maka dari itu, pembuatannya memerlukan standar yang jelas.

"Dengan adanya standar, dapat dipastikan kualitas pengerjaan dan *output* yang dihasilkan akan sesuai dengan yang diharapkan," tegasnya.

DUKUNGAN PENUH

BSN menyambut baik kerja sama dengan BIG. Kepala BSN pun menyatakan akan memberikan dukungan penuh terhadap BIG.

"BSN akan mengidentifikasi standar dan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan program yang diusung BIG," ucap Kukuh.

Kukuh pun juga menegaskan pentingnya standardisasi dalam pengembangan peta di Indonesia untuk memastikan data yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Kami sangat komit dengan RSNi (Rancangan Standar Nasional Indonesia) di bidang IG," ujarnya.

Dengan sinergi ini, BSN berupaya memastikan bahwa peta dan data yang dihasilkan BIG sesuai dengan standar yang berlaku. Sehingga, peta BIG dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh masyarakat. ^(*MGI)

PELATIHAN PRESENTASI DAN VIDEOGRAFI



Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Sinergi Bicara menyelenggarakan *Workshop Videografi dan Presentation Skill* bagi Staf Humas dan Kerja Sama BIG di Bogor pada 26-28 Juni 2023.

Tuntutan untuk terus berinovasi, serta beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi sangat cepat, menjadi tantangan yang harus dihadapi pada era disrupsi. Karena itulah, humas sebagai garda terdepan dalam membangun citra lembaga dituntut dapat kreatif dan terus *upgrade* kemampuan.

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang humas adalah *presentation skill*. Kemampuan presentasi merupakan salah satu bagian dari *public speaking* atau berbicara di depan publik.

Kemampuan lain yang harus dimiliki seorang humas adalah videografi, yaitu proses pengambilan video menggunakan kamera. Untuk itu, kelompok kerja Humas dan Kerja Sama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengadakan '*Workshop Videografi dan Presentation Skill*' bagi para stafnya.

Pelatihan yang digelar di Bogor pada 26-28 Juni 2023 ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di Humas dan Kerja Sama BIG, khususnya dalam kemampuan menyampaikan informasi.

"Ini adalah bagian dari pengembangan SDM, dengan meningkatkan kemampuan *presentation skill* dan

videografi. Sehingga humas BIG mampu mengolah hasil dokumentasi menjadi lebih menarik lagi," ujar Koordinator Humas dan Kerja Sama BIG Mone Iye Cornelia Marschiavelli.

Selama tiga hari, peserta mendapatkan materi antara lain: merancang presentasi; *creative slide design*; *presentation upscaling*, *videography 101*; dan *smartphone videography*. Peserta juga diajak untuk langsung mempraktikkan materi yang telah didapat untuk semakin meningkatkan kemampuan.

Di akhir pelatihan, setiap peserta diminta membuat *slide* dan mempresentasikannya. Selain itu, para peserta juga diberi tugas untuk membuat video dengan *footage* yang sudah disiapkan, maupun diambil sendiri.

Seluruh rangkaian *workshop* tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman berharga. "Tetap semangat untuk kita semua dalam memberikan yang terbaik untuk BIG. Terima kasih karena sudah semangat melaksanakan pelatihan selama tiga hari ini," ujar Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama BIG Suprajaka saat menutup acara. (*MGI)

MEMORI AKHIR JABATAN SESMA



Sekretaris Utama (Sesma) Badan Informasi Geospasial (BIG) Muhtadi Ganda Sutrisna menyerahkan Memori Akhir Jabatan (MAJ) di Lapangan Upacara BIG, pada 7 Juli 2023.

Sekretaris Utama (Sesma) Badan Informasi Geospasial (BIG) Muhtadi Ganda Sutrisna menyerahkan Memori Akhir Jabatan (MAJ) yang sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan yang telah diembannya sejak 2018. Dokumen tersebut juga menjadi penanda ia telah memasuki masa purnabakti sejak 1 Juli 2023.

MAJ secara langsung diserahkan kepada Kepala BIG Muh Aris Marfa'i; Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD) Mohamad Arief Syafii; Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) Antonius Bambang Widjanarto; dan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) Ibnu Sofian. Penyerahan dilaksanakan di Lapangan Upacara BIG, pada 7 Juli 2023.

MAJ berisi perjalanan karir Ganda yang sudah mengabdikan di BIG selama 32 tahun. "Saya masuk di Bakosurtanal pada 1991. Masa kerja saya seperti periode orde baru," selorohnya saat memberikan sambutan.

Sepanjang menjadi Sesma BIG, Ganda berhasil meraih sejumlah pencapaian yang patut dibanggakan. Salah satunya adalah keberhasilannya mengantarkan BIG enam kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Nilai RB BIG meningkat mencapai 75,96 persen, sehingga bisa diusulkan mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 80 persen. "Saya berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya," ujar Ganda.

Kepala BIG mengapresiasi kinerja Ganda dan mengucapkan terima kasih atas masa baktinya selama di BIG. **(*MGI)**

ATLET BIG BERLAGA DI PORNAS XVI KORPRI



Badan Informasi Geospasial (BIG) berpartisipasi dalam Pornas Korpri 2023 yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah pada 14-21 Juli 2023.

Badan Informasi Geospasial (BIG) turut memeriahkan Pekan Olahraga Nasional (Pornas) XVI Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 yang berlangsung pada 14-21 Juli 2023 di Semarang, Jawa Tengah.

Pornas XVI Korpri yang diikuti 6.000 atlet dari 101 kontingen di seluruh Indonesia mempertandingkan 10 cabang olahraga. BIG mengirimkan 45 atlet untuk berlaga di cabang futsal, tenis meja, bulu tangkis, dan senam.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Korpri Zudan Arif Fakhrulloh menyatakan, Pornas XVI Korpri menjadi ajang untuk menyambung silaturahmi. "Selain itu, tentunya juga untuk menunjukkan kekompakan sesama anggota Korpri," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo yang hadir pada acara penutupan memberikan apresiasi atas kesuksesan acara. Ia berharap Pornas XVII Korpri ada penambahan cabang olahraga, sehingga mendatangkan peserta lebih banyak lagi. **(*MGI)**

BIG PICTURE

2 Mei 2023

Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi Ketua Delegasi Indonesia pada Konferensi United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York pada 1-5 Mei 2023. Pada kesempatan ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadir sebagai narasumber terkait pemanfaatan nama rupabumi dalam mitigasi kebencanaan gempa di Kabupaten Cianjur.



12 Mei 2023

Kepala BIG Muh Aris Marfa'i di *site* Geoheritage kompleks batuan Merapi Purba Turgo Plawangan Sleman dalam acara supervisi kegiatan .



12 Mei 2023

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Kota Tangerang pelajari seluk beluk geospasial dalam kunjungannya ke BIG.

23 Mei 2023

Badan Informasi Geospasial (BIG) mendapatkan penghargaan dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan BIG dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kategori "AA" (Sangat Memuaskan) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Banyuwangi.



Juni & Juli 2023

Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar rangkaian kegiatan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) BIG.



15 Juni 2023

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai melantik serta mengambil sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Arsiparis Utama di lingkungan BIG.



16 Juni 2023

Penandatanganan komitmen bersama antara Badan Informasi Geospasial dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia menuju penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN) tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar di Graha BKI di Jakarta.

11 Juli 2023

Badan Informasi Geospasial (BIG) yang diwakili oleh Kepala BIG Muh Aris Marfai menghadiri Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI) di Jakarta.



ANALISIS DAYA DUKUNG LAHAN UNTUK PERMUKIMAN BERBASIS ANCAMAN BENCANA DI PULAU-PULAU KECIL

Studi Kasus di Pulau Panggang dan Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu

Ancaman bencana selayaknya menjadi acuan pembangunan permukiman di setiap daerah.

Indonesia memiliki banyak pulau kecil yang dimanfaatkan sebagai permukiman penduduk. Sebagian masyarakat memilih tinggal di daerah pesisir karena memiliki fleksibilitas terhadap akses transportasi lebih baik dari daratan.

Lambat laun, jumlah penduduk semakin bertambah dan permukiman di kawasan pesisir pun menjadi padat. Gencarnya pembangunan permukiman di kawasan pesisir menjadi masalah karena mengakibatkan ekosistem berubah dan lingkungan pantai menjadi rusak.

Banyak ditemukan pemanfaatan ruang di pulau kecil tidak sejalan dengan peraturan tentang sempadan pantai. Sempadan pantai merupakan daratan sepanjang pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Daerah sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai. Adapun penggunaan fasilitas umum haruslah yang tidak mengubah fungsi lahan sebagai pengaman dan pelestarian pantai.

Pengaturan sempadan pantai merupakan wujud penataan ruang untuk mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat di tengah ancaman bencana. Bila sempadan pantai menjadi rusak—lantaran digunakan bukan untuk peruntukan yang semestinya, seperti permukiman atau tambak—maka dampak buruk yang ditimbulkan akibat bencana bisa menjadi lebih berat.

Saat ini, wilayah pesisir mudah mengalami abrasi dan tidak memiliki daya tahan bila terjadi terjangan gelombang tinggi. Apalagi dengan adanya fenomena perubahan iklim, gelombang tinggi semakin sering terjadi.

Guna mengetahui kondisi lingkungan pulau kecil di Indonesia, Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) melaksanakan penelitian berjudul 'Analisis Daya Dukung Lahan untuk Permukiman Berbasis Ancaman Bencana di Pulau-Pulau Kecil'. Penelitian ini mengambil studi kasus di Pulau Panggang dan Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.

Wilayah Kepulauan Seribu memiliki ancaman abrasi dan kerap mengalami gelombang tinggi yang ekstrem. Maka, melalui penelitian ini dilakukan analisis daya dukung lahan untuk permukiman di Pulau Panggang dan Pramuka berbasis ancaman bencana yang membayangi setiap saat.

Data yang digunakan dalam penelitian meliputi data garis pantai, jumlah penduduk, foto udara, gelombang, arus, dan data tipologi pantai.

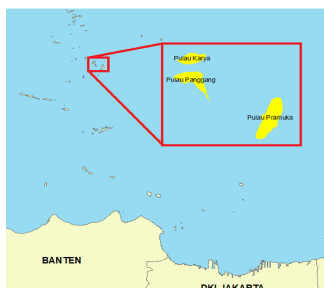
DATA YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN

No	Data	Sumber
1	Foto udara resolusi 5 cm tahun 2021	BIG
2	Garis pantai tahun 2021 skala 1:5.000	BIG
3	Gelombang	ERA5
4	Arus	Copernicus
5	Tipologi pantai	Portal Kemen ESDM
6	Jumlah Penduduk 2021	Pemda Kab. Adm. Kepulauan Seribu

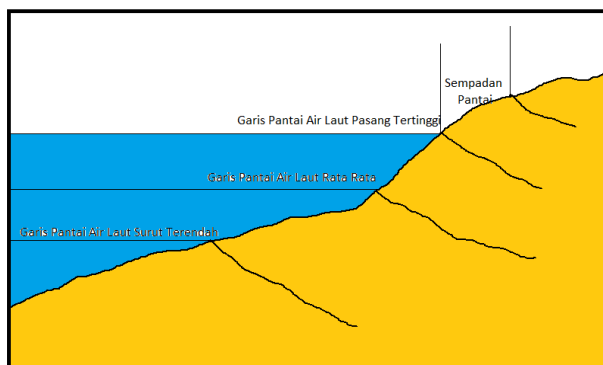
Alur Pelaksanaan Penelitian



Lokasi Penelitian



Dari penelitian ini, ditentukan sempadan pantai dengan metode *buffer* menggunakan software *Geographic Information System* (GIS). Sempadan pantai Pulau Panggang berjarak 10 meter dan Pulau Pramuka 20 meter, dihitung dari garis pantai pasang tertinggi.



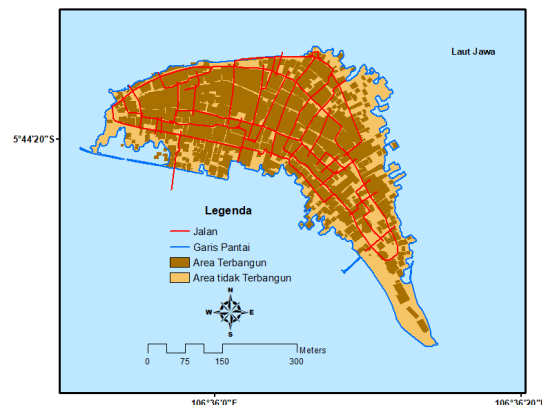
Ilustrasi Sempadan Pantai

KEPADATAN BANGUNAN

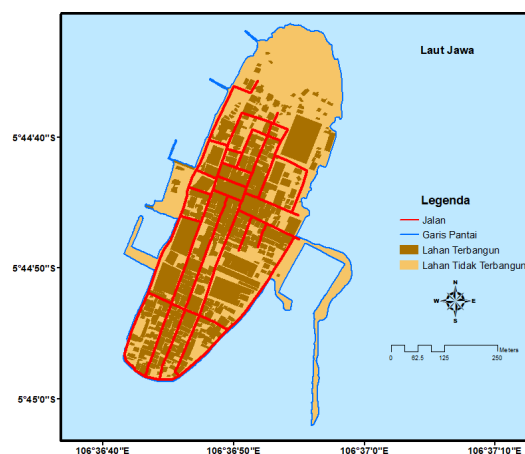
Wilayah Kepulauan Seribu terdiri atas perairan dan pulau-pulau kecil. Sebagian besar pulau kecil masuk ke dalam zona Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS). TNKpS terbagi menjadi menjadi empat zona, yaitu zona inti, perlindungan, pemanfaatan wisata, dan zona permukiman. Terdapat 11 pulau yang dialokasikan sebagai zona perumahan, termasuk Pulau Panggang dan Pramuka.

Pulau Panggang dan Pramuka merupakan pulau yang dialokasikan sebagai zona perumahan. Luas kawasan terbangun di Pulau Panggang dan Pramuka hasil digitasi secara *on screen* menggunakan data foto udara yaitu 9,21 hektare dan 10,36 hektare.

Persentase luas bangunan terhadap luas pulau untuk Pulau Panggang sebesar 61,04 persen dan Pulau Pramuka 44,25 persen. Kepadatan bangunan di Pulau Panggang lebih tinggi dibandingkan Pulau Pramuka.



Hasil Digitasi Wilayah Terbangun di Pulau Panggang



Hasil Digitasi Wilayah Terbangun di Pulau Pramuka

Daya dukung lahan untuk permukiman dapat diketahui dengan memperhitungkan data jumlah penduduk dan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal. Pengamatan dan perhitungan yang telah dilakukan memberikan analisis, bahwa daya tampung Pulau Panggang telah melebihi kapasitasnya.

Jumlah penduduk Pulau Panggang 5.864 jiwa memerlukan lahan untuk permukiman 16,89 hektare. Sehingga masih kekurangan lahan sekitar 10,98 hektare untuk permukiman yang layak dengan asumsi tempat tinggal hanya satu lantai.

Pulau Pramuka memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan untuk permukiman seluas 8,65 hektare, dengan penduduk 1.265 jiwa. Sementara, kebutuhan lahan untuk permukiman seluas 3,64 hektare jika tempat tinggal hanya satu lantai. Lahan untuk permukiman Pulau Pramuka masih memiliki potensi sisa luas lahan 5,01 hektare.

DAYA DUKUNG LAHAN UNTUK PERMUKIMAN DI PULAU PANGGANG DAN PULAU PRAMUKA

No.	Nama Pulau	Lahan Aktual (ha)	Kebutuhan Lahan (ha)	Daya Dukung Lahan (ha)
1.	Panggang	5,91	16,89	10,98
2.	Pramuka	8,65	3,64	5,01

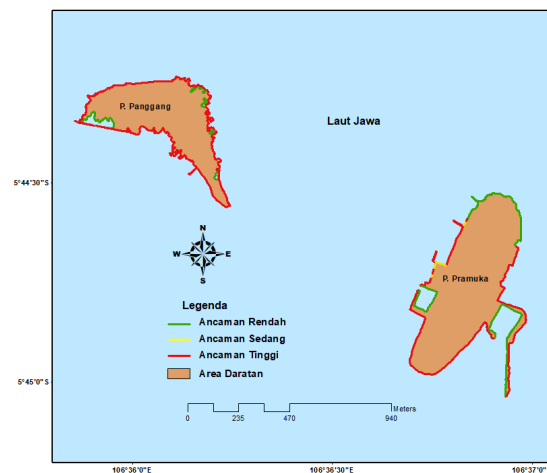
ANCAMAN BENCANA

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2021 yang dikeluarkan Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepulauan Seribu masuk dalam ancaman bencana gelombang ekstrem dan abrasi kelas tinggi.

Hasil perhitungan panjang garis pantai di Pulau Panggang yang memiliki ancaman gelombang ekstrem dan abrasi dengan tingkat ancaman tinggi sebesar 77,36 persen dari total panjang garis pantai. Tingkat ancaman tinggi ancaman gelombang ekstrem dan abrasi di Pulau Pramuka sebesar 57,11 persen dari total panjang garis pantainya.

Hasil analisis tutupan vegetasi di Pulau Panggang mempunyai besaran kurang dari 40 persen. Seluruh wilayah garis pantai tidak ditemukan vegetasi, hampir semua lahan berupa wilayah terbangun.

Sedangkan, tutupan vegetasi di Pulau Pramuka bervariasi. Tutupan lahan kurang dari 40 persen, sebesar 66,14 persen; tutupan lahan 40-80 persen, sebesar 18,77 persen; dan tutupan lahan lebih dari 80 persen, sebesar 15,09 persen. Pada sebagian besar wilayah yang tidak ada vegetasinya, dibangun infrastruktur untuk mencegah terjadinya abrasi.



Sebaran Kelas Ancaman Gelombang Tinggi dan Abrasi

Penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar memperhatikan ancaman bencana gelombang ekstrem dan abrasi ketika membangun permukiman di pulau-pulau kecil. Untuk wilayah yang memiliki tingkat ancaman bencana gelombang ekstrem dan abrasi dengan kategori tinggi, perlu dibangun infrastruktur pemecah gelombang.

Peneliti:

Baba Barus (Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, FP-IPB)
Herianto (Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, FP-IPB)
Vincentius P. Siregar (Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, FPIK-IPB)
Mira Harimurti (Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial)

Halaman WhatsApp Group lapak kuliner BIG.



LAPAK KULINER BIG TERSEDIA RAGAM MAKANAN KERING DAN BASAH

Tadinya melangkah sendirian, kini bergerak bersama-sama. Begitulah Komunitas Lapak Kuliner BIG menggeliat membangun bisnis dari jejaring pertemanan.

Pendiri Lapak Kuliner BIG, Farid Yuniar, mengungkapkan bahwa komunitas ini bermula dari munculnya beragam status di *WhatsApp* (WA) karyawan Badan Informasi Geospasial (BIG) yang menawarkan berbagai makanan. Mulai dari *reseller* hingga yang diproduksi sendiri.

Farid dan beberapa temannya kemudian berinisiatif mengajak para penjual makanan tersebut tergabung dalam satu grup WA. Ajakan ini mendapat tanggapan positif.

"Langsung pada *balesin* tuh, 'mau mau'," tutur Farid.

Farid pun memulai grup WA ini

dengan admin dua orang. Pada 12 Maret 2022, grup WA Lapak Kuliner BIG resmi diluncurkan dengan anggota 24 orang.

Tidak butuh waktu lama, anggota grup WA Lapak Kuliner semakin bertambah banyak. Makanan dan minuman yang dijual sangat variatif.

"Jualannya itu bukan makanan kering aja, bukan sebatas roti atau kue lebaran. Banyak jajanan basah juga, dibeli buat *weekend*. Aku *scroll* lagi, sekarang jenisnya semakin beragam, bahkan ada yang jualan kurma dan daging," imbuh pria kelahiran 24 Juni 1986 ini.

SANGAT MEMBANTU

Ternyata, banyak anggota Lapak Kuliner BIG mulai merintis usaha jualan *online* sejak pandemi. Di antaranya ada yang menjual makanan beku.

"Ini sangat membantu keuangan keluarga, karena menjadi salah satu 'pintu' rezeki," imbuh Farid.

Wadah grup WA Lapak Kuliner BIG pun juga kerap melakukan *sharing* informasi kepada para anggotanya. Antara lain memberikan masukan agar penjual tidak melakukan promo setiap hari, juga mengatur pesanan secara *japri*.

Ke depan, Lapak Kuliner BIG berniat lebih merangsang eksistensi bisnis dan meningkatkan omzet anggotanya. Kegiatan yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan *event* kuliner *offline*.

"Mungkin nanti mau bikin *polling* dan admin tambahan untuk mengurus kegiatan-kegiatan begitu," pungkas Surveyor Pemetaan Madya dari Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim ini. (*MGI)

ZIDNI FARHATI SILMI

Ketua Tim Survei Atlas Pariwisata Labuan Bajo

TANTANGAN SEORANG SURVEYOR



Zidni Farhati Silmi Ketua Tim Survei Atlas Pariwisata Labuan Bajo.

Kesuksesan pelaksanaan Survei Atlas Pariwisata Labuan Bajo beberapa waktu lalu tak lepas dari sosok Zidni Farhati Silmi. Perempuan kelahiran Magelang pada 18 Oktober 1993 ini dipercaya sebagai ketua tim survei.

Bagi Zidni, pekerjaan menyusun atlas pariwisata merupakan tantangan tersendiri. Ia harus mampu mengomando tim agar mampu bergerak cepat, karena objek yang harus dipetakan cukup banyak dengan waktu terbatas.

Menurut Zidni, tantangan lainnya adalah kemampuan menulis yang harus dimiliki tim survei atlas pariwisata. Mereka harus mampu menarasikan berbagai informasi yang berhasil digali di lapangan.

"Waktu kuliah, kami biasa (melakukan) teknis pembuatan peta. Jadi, untuk menulis narasi sebuah buku itu susah kalau tidak punya *basic* pengetahuannya. Jadi, mau tidak mau, kami harus *searching* terkait pariwisata. Kami harus mempelajari secara otodidak materi yang akan kami buat *outlook*-nya," urai Zidni.

MEMBAGI WAKTU

Zidni mengaku, sudah sering melakoni survei sejak menjadi surveyor di Pusat Tata Ruang dan Atlas (PTRA) Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 2018. Lulusan Jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada ini pun sangat menikmati pekerjaannya.

"Ketika survei ke berbagai daerah, saya melihat beragamnya masyarakat dengan karakteristik dan kebiasaan yang berbeda. Ini menjadi pelajaran bagi saya, bahwa hidup itu tidak perlu seragam. Perbedaan itu justru memperkaya diri," tutur perempuan yang senang memasak ini.

Satu-satunya hal yang pasti terjadi dalam kehidupan di dunia ini adalah perubahan. Begitu pun yang harus dihadapi Zidni, perubahan statusnya yang kini menjadi seorang ibu menuntutnya mampu menyesuaikan diri.

"Saya sekarang sudah punya anak, tantangannya jadi berbeda. Kalau dulu, mau ke mana-mana ayo saja. Kalau sekarang, saya harus bisa menyusun skala prioritas kapan bisa *in charge* di lapangan. Jika masih bisa di-*back up* yang lain, saya berusaha tetap di kantor," terangnya.

Tentunya dukungan suami menjadi pilar utama dia bisa menjalani peran sebagai seorang ibu sekaligus surveyor. Ia hanya dituntut untuk dapat pandai membagi waktu antara tugas di lapangan dan di rumah. (*MGI)



Pemakaman Batu Lemo di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Dok: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

MAKAM BATU LEMO TORAJA

Desa Lemo yang terletak di Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan menjadi salah satu destinasi yang memukau karena keunikannya. Desa ini memiliki daya tarik berupa pemakaman kuno yang berada di tebing batu dengan pemandangan hamparan sawah yang luar biasa indah.

Jika pemakaman identik dengan hal-hal supranatural, berbeda dengan pemakaman batu di Desa Lemo yang jauh dari kesan angker. Kuburan Batu Lemo yang dibentuk di dinding bukit ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16.

Suku setempat memiliki kepercayaan jika makam lebih tinggi maka lebih dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya masyarakat membangun makam di atas tebing batu.

Biasanya jenazah disimpan di dalam peti, lalu diletakkan di dalam lubang yang tersebar di dinding tebing. Setidaknya, terdapat 75 lubang berukuran sekitar 3x5 meter persegi. Setiap lubang diisi jenazah yang berasal dari satu keluarga.

Menariknya, dinding tebing dihiasi dengan patung pahat yang disebut Tao-tao. Patung ini menjadi simbol orang yang telah meninggal, sehingga bentuknya berdasarkan kebiasaan sewaktu orang tersebut masih hidup.

Masyarakat setempat percaya, keluarga yang disemayamkan di Batu Lemo sedang menjalani kehidupan bersama dewa. Sehingga mereka memberikan bekal atau bawaan untuk si jasad seperti layaknya hidup di dunia.

Proses pemakaman di Batu Lemo dilaksanakan melalui upacara adat yang dinamakan Rambu Solo. Upacara ini merupakan penghormatan terakhir untuk orang yang sudah meninggal, ketika saudara dan karib kerabat bersama-sama mengantarkan arwah menuju alam roh.

Upacara Rambu Solo memerlukan biaya yang besar, karena harus menyembelih banyak kerbau atau babi. Semakin tinggi strata sosial orang yang meninggal, maka semakin banyak hewan yang harus disembelih.

Banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk upacara Rambu Solo membuat sebagian jenazah tidak langsung dimakamkan. Jenazah untuk sementara disimpan di tongkonan hingga keluarga memiliki cukup dana untuk menyelenggarakan upacara Rambu Solo. Tidak jarang, dibutuhkan waktu hingga tahunan untuk dapat melaksanakan Rambu Solo. (*MGI)



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU

Dirgahayu

REPUBLIK

INDONESIA

